

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA  
(SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA  
GRUJUGAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**LU'LU'UL MUKARRAMAH WE**

**NPM: 2020703025**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS IBRAHIMY  
SITUBONDO  
2024**

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA  
(SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA  
GRUJUGAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Ibrahimy

Oleh:

**LU'LU'UL MUKARRAMAH WE**

**NPM: 2020703025**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS IBRAHIMY  
SITUBONDO  
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lu'lu'ul Mukarramah WE  
NPM : 2020703025  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 01 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



**Lu'lu'ul Mukarramah WE**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

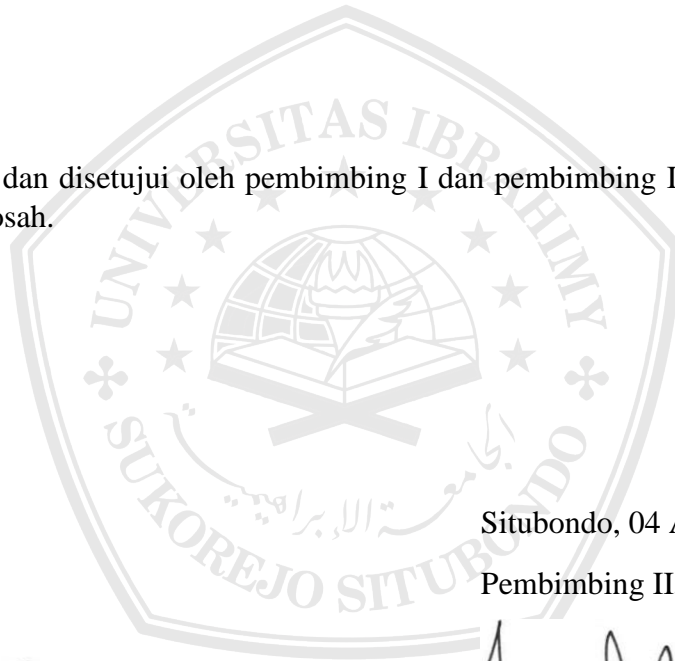
Skripsi ditulis oleh:

Nama : **Lu'lu'ul Mukarramah WE**

NPM : **2020703025**


Judul : **ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA GRUJUGAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II untuk diuji pada sidang/munaqosah.




Situbondo, 04 Agustus 2024

Pembimbing I,

  
**Abd. Mujib, S.Pd.I., M. Akun**

Pembimbing II,

  
**Hendrarto Widodo, M. Ak.**

PENGESAHAN

SKRIPSI

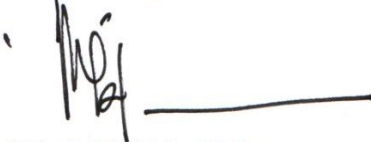
**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA  
(SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA  
GRUJUGAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP**

**LU'LU'UL MUKARRAMAH WE**  
2020703025

telah dipertahankan di depan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada hari Selasa,  
Tanggal 27 Agustus 2024 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S.AK)  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi.

Tim Penguji,

Ketua Sidang,



**Wisri, M.Pd.I., M.Sos.**

Sekretaris Sidang,



**Hofi Dwi Kurrohman, S.Kom.**

Penguji I,



**Achmad, M.Pd.I., M.Akun.**

Penguji II,



**Roni Yanto, M.Acc.**

Mengetahui  
Dekan,  


**KH. Moh. Aso Samsudin, M.Pd.I**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma‘idah 5:8)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 108.

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ini teruntuk:

1. *For myself*, terimakasih sudah berjuang sampai di tahap ini. Terus semangat untuk hari-hari berikutnya.
2. *My beloved parents, my universe* **Ayah Wahed** and **Umi Erna Haninastutik**, yang namanya selalu terucap dalam penyempurnaan do'a yang penulis panjatkan kepada sang khaliq sebagai insan yang mulia dan paling berperan dalam hidup. Terimakasih untuk doa-doa yang kalian rapalkan seusai sholat, dorongan, semangat, motivasi, dalam menjalani lika-liku hidup. Menjadi sosok terhebat di balik suka dan duka. Terimakasih sudah turut andil mensukseskan karya tulis ini.
3. Adik-adik tercinta **Sika, Mila, Arul, and, Aril** terimakasih selalu mengundang tawa dan menyemangati dengan cara kalian.
4. Almamaterku **Universitas Ibrahimi** terimakasih telah menjadi naungan di balik gelar namaku. *All my best wishes for you.*
5. *All my friends in Language Boarding House (LBH) Dormitory*, sahabati Ummahat LBH, Akuntansi 2020, Iksass Sum-Pam, Syarifah Azkiya, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semangat kalian. Menjadi mediator proses pendewasaan diri.
6. *Kulluhum fi qolby* terimakasih untuk semangat, motivasi, dan waktu yang telah diluangkan untuk sekedar mendengar ceritaku. Terimakasih telah menjadi saksi perjuanganku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah kesehatan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Penganugerah kemudahan yang membebaskan makhluk-Nya dalam pemilihan jalan. Tuhan yang jalan menuju jalan-Nya tidak memadai diringkai dengan konsep kiri dan kanan, timur, dan barat, atau utara dan selatan. Tetapi jalan-Nya satu, yang tampak dalam penglihatan bercabang-cabang dan asri dengan keindahan.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang setiap tetes syafaatnya senantiasa diharapkan oleh setiap insan beriman.

Skripsi berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA GRUJUGAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP”** disusun untuk memenuhi persyaratan akhir studi Program Strata Satu guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.

Terimakasih yang paling mendalam penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini berupa arahan, dorongan semangat, saran, dan doa maupun fasilitas belajar. Besar harapan penulis dengan selesainya skripsi ini dapat mengantarkan penulis menuju gerbang kesuksesan yang hakiki. Untuk semua itu selayaknya penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, S.Sy., MH. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
2. KH. Ach. Fadlail, SH., MH. selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo
3. KH. Moh. Aso Samsudin, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo

4. Bapak Abd Mujib, S.Pd.I., M.Akun. selaku ketua program study Akuntansi sekaligus pembimbing satu dalam tugas skripsi ini, yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Hendrarto Widodo, M.Ak. selaku pembimbing dua. Semoga segala kesabrannya dalam membimbing kami menjadi sebuah amal jariah di akhirat.
6. Kepala Desa Grjugan dan seluruh aparat desa yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan berbagi pengalaman.
7. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dan seluruh pihak terkait yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. *Jazakumullahu khairan.*

Akhirnya, semoga dukungan dan amal baik yang telah diberikan. Semoga dicatat sebagai amal sholeh di sisi Allah SWT. dan mudah-mudahan Skripsi ini memberikan banyak manfaat. *Aamiin ya Rabbal Alamiin.*

Sukorejo, 01 Agustus 2024

Penulis,

**Lu'lu'ul Mukarramah WE**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
E. Definisi Operasional .....	21
F. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KAJIAN TEORI.....	29
A. Pemerintah Desa.....	29
B. Pengelolaan Keuangan Desa .....	30
C. Aplikasi Siskeudes .....	39
D. Konsep Akuntabilitas .....	43
E. Kerangka Pemikiran .....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Kehadiran Peneliti .....	50
C. Lokasi Penelitian .....	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Analisis Data.....	56
G. Pengujian Keabsahan Data.....	59
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	60
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Paparan Data .....	64
B. Pembahasan .....	92
1. Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep .....	92
2. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.....	94
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Grujugan dengan aplikasi Siskeudes.....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
Table 2.1. Jadwal waktu penyusunan APBDes.....	41
Tabel 4.1. Data penduduk desa Grujugan.....	64
Tabel 4.2. Anggaran Pendapatan Desa Grujugan.....	73
Tabel 4.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	74
Tabel 4.4. Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi siskeudes dengan berdasar Permendagri No. 20 Tahun 2018.....	93



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	31
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 3.1. Komponen analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.....	57
Gambar 4.1. Peta Letak Geografis Desa Grujugan.....	63
Gambar 4.2. Grafik pekerjaan masyarakat desa Grujugan.....	65
Gambar 4.3. Struktur Pemerintahan Desa Grujugan.....	67
Gambar 4.4. Rencana Anggaran Biaya Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.....	74
Gambar 4.5. Parameter Perencanaan.....	80
Gambar 4.6. <i>Output</i> data tahap perencanaan.....	80
Gambar 4.7. Parameter Penganggaran.....	81
Gambar 4.8. <i>Output</i> data tahap penganggaran.....	82
Gambar 4.9. Parameter Penatausahaan.....	83
Gambar 4.10. <i>Output</i> data tahap penatausahaan.....	83
Gambar 4.11. Parameter Pelaporan/Pembukuan.....	85
Gambar 4.12. <i>Output</i> data tahap pelaporan/pembukuan.....	85
Gambar 4.13. Transparansi anggaran secara online.....	88
Gambar 4.14. Transparansi anggaran melalui <i>banner</i> .....	89

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2: Lembar Observasi
- Lampiran 3: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Grujungan Tahun 2019-2025
- Lampiran 4: Dokumentasi Pelaporan Manual Dan Tampilan Awal Siskeudes
- Lampiran 5: Dokumentasi Salah Satu Input Dan Output Aplikasi Siskeudes
- Lampiran 6: Transparansi Realisasi Anggaran dan APBDes dengan Banner dan Sistem Informasi Desa Grujungan
- Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Desa Dan Sekeretaris Desa
- Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara Bersama Kaur Keuangan Dan BPD
- Lampiran 9: Dokumentasi Wawancara Bersama Operator Siskeudes Dan Pendamping Desa
- Lampiran 10: Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 11: Surat Tugas Penelitian
- Lampiran 12: Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 13: Kartu Bimbingan Skripsi

## ABSTRAK

Lu'lu'ul Mukarramah WE. 2024. **Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.** Skripsi, Program Studi Akuntansi, Universitas Ibrahimy. Pembimbing: (I) Abd. Mujib, S.Pd.I., M. Akun. (II) Hendarto Widodo, M. Ak.

Sistem keuangan Desa merupakan sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran/ pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Tuntutan akuntabilitas publik dalam lingkup pemerintahan khususnya bidang keuangan merupakan suatu keharusan yang perlu diselesaikan dan dipertanggungjawabkan dalam paradigma kepemimpinan. Akuntabilitas merupakan kewajiban para pemegang amanah beserta aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan menyajikan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan atas pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa di desa Grujugan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik model Miles dan Huberman. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, namun Desa Grujugan belum melakukan pemaksimalan perolehan pendapatan asli desa. Aplikasi Sistem keuangan desa (Siskeudes) sudah diterapkan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan sudah efektif dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Kendala dalam penerapan siskeudes yakni gangguan jaringan dan *maintenance* yang terkadang error. Selain itu seluruh pelimpahan kegiatan penginputan pada aplikasi siskeudes hanya difokuskan kepada operator siskeudes yang berjumlah satu orang. Pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi siskeudes lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Grujugan dengan menu yang tersedia dalam siskeudes yang telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah termasuk kontrol pengawasan oleh pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pengelolaan keuangan Desa, Akuntabilitas.

## ABSTRACT

Lu'lu'ul Mukarramah WE. 2024. **Analysis of the Application of the Village Financial System (Siskeudes) in Financial Management in Grujugan Village, Gapura District, Sumenep Regency.** Thesis, Accounting Study Programme, Ibrahimi University. Supervisor: (I) Abd. Mujib, S.Pd.I., M. Akun. (II) Hendrarto Widodo, M. Ak.

The Village financial system is an application launched by the government to improve Village financial management based on the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 20 of 2018 concerning financial management. Village financial management is all activities that include planning, budgeting/implementation, administration, and accountability. The demand for public accountability in the scope of government, especially in the financial sector, is a necessity that needs to be resolved and accounted for in the leadership paradigm. Accountability is the obligation of the trustees and their apparatus to provide accountability, report, and present all activities that are their responsibility to the principal who has the right and authority for accountability. This study was conducted to determine the application of the siskeudes application in village financial management in Grujugan village. This research uses a qualitative method. Data sources were obtained from primary data and secondary data. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model technique. The conclusion of this study shows that village financial management in Grujugan Village is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 concerning village financial management, but Grujugan Village has not maximized the acquisition of village revenue. The Village Financial System (Siskeudes) application has been implemented properly in accordance with applicable regulations and has been effective in village financial management in Grujugan Village, Gapura District, Sumenep Regency. Obstacles in the application of Siskeudes are network and maintenance disruptions that sometimes errors. In addition, all delegation of input activities in the siskeudes application is only focused on one siskeudes operator. Financial management using the siskeudes application further improves the accountability of Village financial management in Grujugan Village with the menu available in siskeudes which has been adjusted to government regulations including supervisory control by local government.

**Keywords: Village Financial System (Siskeude), Village Financial Management, Accountability.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Desa merupakan unsur pemerintahan terkecil dalam skala pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan segenap perangkat Desa sebagai bagian dari pengelola pemerintahan Desa.<sup>1</sup> Pemerintahan Desa merupakan tatanan pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan rakyat. Dalam mengatur hal-hal yang mencakup pemerintahan desa, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai landasan hukum yang tertuang dalam Undang-undang. Dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah memberikan hak wewenang kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan hak kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa sendiri.<sup>2</sup>

Sejalan dengan dinamika pembangunan desa dalam UU No 6 tahun 2014 bahwa perlu adanya pembangunan kawasan pedesaan.<sup>3</sup> Perencanaan

---

<sup>1</sup> Yuliansyah & Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 9.

<sup>2</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dan pelaksanaan pembangunan desa secara administratif dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Untuk merealisasikan beberapa program kerja Desa, pemerintah Desa akan mendapatkan anggaran dari APBN sebesar 10% dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD.<sup>4</sup> Hasil realisasi dari pengelolaan keuangan Desa akan dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah setempat.

Dengan adanya wewenang yang meluas dari pemerintah pusat terhadap pemerintahan desa untuk mengatur dan mengelola potensi kekayaan dan anggaran desa menjadikan keuangan Desa sangat rentan sekali terhadap kasus penyelewengan. Berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dalam majalah Senator DPDRI bahwasanya KPK mencatat pada 2023 telah terjadi 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 orang pelaku. 50% di antara pelaku itu adalah kepala desa itu sendiri.<sup>5</sup>

Pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa berpedoman langsung pada peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap desa harus mengelola keuangan desa dengan transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib administrasi. Hal ini sesuai

---

<sup>4</sup> Yuliansyah & Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 34.

<sup>5</sup> Taufik Jatmiko, "Majalah Senator DPDRI edisi juli 2023", dalam [dpd.go.id/media/majalah%20senator%20juli%202023.pdf](http://dpd.go.id/media/majalah%20senator%20juli%202023.pdf) (diakses tanggal 22 Januari 2024), 7.

dengan amanat Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 2 yang kemudian direvisi dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>6</sup>

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.<sup>7</sup> Pelaporan keuangan Desa terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.<sup>8</sup> Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan disampaikan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk laporan dengan melibatkan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan yang baik dalam suatu organisasi tidak akan lepas dari manusia atau sumber daya manusia yang ikut andil serta memiliki nilai-nilai tanggung jawab dalam mengemban amanah. Kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa akan sangat berimbas terhadap hasil kinerja pengelolaan keuangan Desa. Laporan keuangan yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan merupakan hasil akhir dari proses

---

<sup>6</sup> KEMENDAGRI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 6.

<sup>7</sup> Ibid, 3.

<sup>8</sup> Hadiat Trihutomo Wibowo, Deni Triyanto, Adi Sutojo, "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur", *Journal of Social Politics and Governance*, Vol.2, No.2 (Desember, 2020), 154.

akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara aktivitas suatu entitas dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas entitas tersebut. Laporan keuangan pemerintah sangatlah berperan sebagai hasil dari tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.<sup>9</sup>

Perkembangan teknologi sistem informasi dalam segala aspek dunia kerja mengharuskan pemerintah desa melek akan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Dalam hal keuangan, teknologi yang terkemas dalam sebuah aplikasi sistem keuangan sangatlah berperan penting untuk membantu proses pencatatan keuangan hingga pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain mempermudah proses *input* data dan perhitungan, sebuah sistem keuangan yang terkoordinasi dan terkomputerisasi dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan.

Aplikasi Siskeudes merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi dalam pembuatan anggaran, pembukuan, serta pelaporan keuangan desa yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dirancang dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu aplikasi ini juga diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri Nomor 20

---

<sup>9</sup> Maryam, Kamaruddin Sellang, dan Erfina, "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Maiwa", *JIA*, Vol.9, No.3 (Desember, 2021), 173.

Tahun 2018 yaitu pengelolaan keuangan desa harus dikelola dan dilaporkan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Aplikasi Siskeudes diluncurkan pada tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas saran dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini diperkuat dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang aplikasi pengelolaan keuangan desa dan surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang himbauan terkait pengelolaan keuangan desa/dana desa.<sup>10</sup>

Sebelum aplikasi siskeudes diluncurkan sebagian besar desa di Indonesia menggunakan Microsoft excel atau aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta untuk membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan. Jika aplikasi yang digunakan berbeda di masing-masing desa, maka akan menghasilkan output yang berbeda dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah daerah dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan Desa. Oleh sebab itu siskeudes hadir demi mewujudkan peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan.

---

<sup>10</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES versi 2.0)* tahun 2018, 3.

Akuntabilitas penyajian laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban keuangan Desa merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan Desa. Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan oleh pemerintah daerah kepadanya dalam rangka tercapainya tujuan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.<sup>11</sup>

Suatu laporan dapat dikatakan berkualitas apabila mampu menyajikan sebuah informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan serta dapat dipahami. Hal ini selaras dengan isi dari peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.<sup>12</sup> Ketika seluruh aspek tersebut telah terpenuhi dengan baik berarti pemerintah desa telah mampu mewujudkan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa.<sup>13</sup> Rendahnya akuntabilitas akan menyebabkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik dan tingginya kasus korupsi.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, perlu ditelaah mengenai pengelolaan keuangan Desa yang diterapkan dalam suatu Desa.

---

<sup>11</sup> Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, Vol.2, No.01 (2016), 17.

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, 10-11.

<sup>13</sup> Pradono F.C and Basukianto "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 2015

<sup>14</sup> Hadiat Trihutomo Wibowo, Deni Triyanto, Adi Sutojo, "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur", *Journal of Social Politics and Governance*, Vol.2, No.2 (Desember, 2020), 154.

Grujungan merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sumenep. Ujung timur berbatasan dengan Desa Jadung Kecamatan Dungek, ujung barat Berbatasan dengan Desa Longos Kecamatan Gapura, ujung utara berbatasan dengan kecamatan betang-batang, dan ujung Selatan berbatasan dengan laut jawa.<sup>15</sup> Sejak aplikasi siskeudes diluncurkan tidak seluruh desa di kabupaten sumenep menerapkan pengelolaan keuangan Desa dengan baik menggunakan aplikasi siskeudes, termasuk desa yang berada di kepulauan. Hal ini disebabkan hambatan berupa koneksi internet yang tidak stabil dan sumber daya manusia yang belum siap sehingga berpengaruh terhadap proses penerapan aplikasi siskeudes.<sup>16</sup>

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis, desa Grujungan telah menggunakan aplikasi siskeudes semenjak mendapat mandat dari kabupaten untuk mengoperasikan aplikasi tersebut pada tahun 2017. Namun pada saat pertama kali siskeudes diterapkan di Desa Grujungan belum dapat diterapkan dengan baik karena aplikasi ini masih baru dan butuh pelatihan dalam mengoperasikannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada tahun 2019 di Desa Grujungan telah terjadi penyelewengan dana desa sebesar 600.000.000 yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Kasus ini telah dilaporkan pada pihak kejaksaan dan ditindak lanjuti. Dari kasus ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan

---

<sup>15</sup> [www.grujungan-gpr.desa.id](http://www.grujungan-gpr.desa.id) diakses pada 4 Juni 2024.

<sup>16</sup> Tribun News Headline, Kabar Madura 23 Januari 2024, diakses pada 05 Februari 2024.

desa belum dikelola dengan baik pada aplikasi siskeudes sehingga terjadi tindak penyelewengan.<sup>17</sup>

Masalah utama dalam hal keuangan Desa adalah pengelolaan keuangan Desa, Dimana dalam mengelola keuangan dibutuhkan keahlian khusus sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keuangan Desa diperoleh dari pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer, dan kelompok pendapatan lain-lain. Pemerintah Indonesia menghadirkan aplikasi siskeudes sebagai salah satu media untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa. Hal ini akan memudahkan perangkat desa ketika akan melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul **“Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Dalam mengidentifikasi suatu masalah, diperlukan adanya pembatasan terhadap masalah yang akan dikaji. Hal ini dilakukan agar fokus penelitian lebih terkonsentrasi dan terarah. Dalam hal ini peneliti memilih fokus pada masalah:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?

---

<sup>17</sup> Zubairi, *Wawancara*, Sumenep, 5 Juni 2024.

2. Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisa pengelolaan keuangan desa di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk menganalisa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
- c. Untuk menganalisa bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian penelitian,<sup>18</sup> sehingga akan memberikan sumbangsih baik secara teoritis maupun praktis. Beberapa manfaat penelitian tersebut adalah:

- a. Secara Teoritis

---

<sup>18</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 67.

- 1) Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan kerangka pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan secara umum.
- 2) Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah wawasan yang lebih luas mengenai penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Secara Praktis

- 1) Riset atau penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pemerintah desa untuk terus beradaptasi dengan pembaharuan teknologi digital yang terus berkembang dan pemanfaatannya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
- 2) Memberikan informasi bagi pemerintah desa agar mengoptimalkan fungsi aplikasi Siskeudes yang telah dirancang oleh pemerintah pusat.
- 3) Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan aplikasi siskeudes untuk kemudian menjadi bahan evaluasi pihak-pihak terkait.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan penelitian terhadap karya-karya ilmiah atau penelitian terdahulu sebagai acuan dan pedoman

penelitian lebih lanjut agar mendapatkan data valid serta menghindari terjadinya duplikasi, plagiarisme, serta menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian. Beberapa karya ilmiah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan di atas yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Kasim pada tahun 2022 dengan judul **“Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat)”**. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Samatiga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan desa di Kecamatan Samatiga. Akuntabilitas laporan keuangan di seluruh desa yang berada di Kecamatan Samatiga pasca diterapkannya aplikasi Siskeudes mampu membawa perubahan yang cukup baik terhadap pengelolaan keuangan desa.<sup>19</sup>

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaan tersebut yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu kasim terfokus pada seluruh desa yang berada di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

---

<sup>19</sup> Ibnu Kasim, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat)” (Skripsi – Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2022), 44-45.

sebagai populasi penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada satu desa saja.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Kasim menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Kasim fokus terhadap *output* dari pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas proses pengelolaan keuangan di Desa Grujugan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas aplikasi siskeudes.

2. Penelitian yang dilakukan oleh El Qorina Hajar pada tahun 2019, berjudul **“Implementasi Siskeudes Dalam Pembangunan Desa Perspektif *Tafwidh* dan *Tanfidzi* Imam Al-Mawardi (Studi di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)”**. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Siskeudes di Desa Sendangwulur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan belum efektif dalam pembanguna Desa dikarenakan masih banyak aparat desa yang tidak ahli dalam bidang yang dibutuhkan, sehingga sebagian Pemerintah Desa menjalankan tugas secara *double*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> El Qorina Hajar, “Implementasi Siskeudes Dalam Pembangunan Desa Perspektif *Tafwidh* dan *Tanfidzi* Imam Al-Mawardi (Studi di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)” (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), 100-101.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal approach*. Sedangkan penelitian oleh penulis menggunakan metode kualitatif.
- b. Membahas implementasi Siskeudes dalam konteks pembangunan Desa. Sedangkan penelitian oleh penulis membahas penerapan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa.
- c. Penelitian tersebut menggunakan kajian keislaman perspektif Imam al-mawardi.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu membahas Sistem Keuangan Desa.

3. Penelitian oleh Dwi Nurrahmawati, Yuanne Gabrila Sriyanto, dan Nuwun Priyono tahun 2023 dengan judul penelitian “**Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Rejosari Kecamatan Pakis**”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di desa Rejosari sudah cukup efektif dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Dikatakan masih cukup efektif karena

beberapa kendala kerap terjadi pada saat pengoperasian aplikasi siskeudes, seperti adanya kesalahan sistem pada saat entry.<sup>21</sup>

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah:

- a. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian tersebut adalah analisis efektifitas penerapan aplikasi siskeudes. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak membahas analisis efektifitas penerapan siskeudes.
- b. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian tersebut yakni terkait hambatan atau kendala penerapan aplikasi siskeudes. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak merumuskan masalah terkait kendala atau hambatan penggunaan aplikasi siskeudes.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

- a. Menggunakan jenis penelitian metode kualitatif
  - b. Menggunakan variabel penelitian aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Rahmah tahun 2020 dengan judul penelitian **“Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

---

<sup>21</sup> Dwi Nurrahmawati, dkk, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Rejosari Kecamatan Pakis”, *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol.2, No.2, (Juni, 2023), 113.

menggunakan Teknik analisis tema (objek penelitian). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa aplikasi Siskeudes yang diterapkan di desa Kambitin sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan pengukuran efektifitas.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Rahmah menggunakan teknik analisis tema, sedangkan metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif.
- b. Penelitian tersebut tidak membahas pengelolaan keuangan Desa.
- c. Penelitian tersebut membahas penerapan siskeudes dengan pengukuran efektifitas, sedangkan penelitian oleh penulis tidak menggunakan pengukuran efektifitas.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Rahmah dengan penulis yaitu membahas penerapan aplikasi siskeudes.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mutia Basril tahun 2021 dengan judul **“Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor yang Mempengaruhinya”**. Dengan simpulan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa pada pemerintahan Desa di

---

<sup>22</sup> Maulidya Rahmah dan Rahmi Hayati, “Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong” *JAPB*, Vol. 3, No.2, (2020). 173.

Kabupaten Rokan Hulu.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mutia Basril menggunakan metode kuantitatif, sedangkan metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif.
- b. Penelitian tersebut membahas faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak membahas faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa.
- c. Penelitian tersebut tidak membahas penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mutia Basril dengan penulis yaitu sama-sama membahas pengelolaan keuangan Desa.

**Tabel 1.1** Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ibnu Kasim, Universitas Teuku Umar	Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini	a. Penelitian yang dilakukan olh Ibnu kasim terfokus pada

<sup>23</sup> Yesi Mutia Basril, "Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Akuntansi*, Vol.8, No.1, (2021), 48.

	Aceh Barat, 2022.	Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat)	adalah sama-sama membahas aplikasi siskeudes.	<p>seluruh desa yang berada di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sebagai populasi penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada satu desa saja.</p> <p>b. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Kasim menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif.</p> <p>c. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Kasim fokus terhadap <i>output</i> dari pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas proses pengelolaan keuangan di Desa Grujungan.</p>
--	-------------------	---	---	--

2	El Qorina Hajar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	Implementasi Siskeudes Dalam Pembangunan Desa Perspektif <i>Tafwidh</i> dan <i>Tanfidzi</i> Imam Al-Mawardi (Studi di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu membahas Sistem Keuangan Desa.	a. Menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan <i>socio legal approach</i> . Sedangkan penelitian oleh penulis menggunakan metode kualitatif. b. Membahas implementasi Siskeudes dalam konteks pembangunan Desa. Sedangkan penelitian oleh penulis membahas penerapan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa. c. Penelitian tersebut menggunakan kajian keislaman perspektif Imam al-mawardi.
3	Dwi Nurrahmawati, 2023	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Rejosari Kecamatan Pakis	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan Menggunakan variabel penelitian aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa.	a. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian tersebut adalah analisis efektifitas penerapan aplikasi siskeudes. Sedangkan penelitian yang

				<p>dilakukan oleh peneliti tidak membahas analisis efektifitas penerapan siskeudes.</p> <p>b. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian tersebut yakni terkait hambatan atau kendala penerapan aplikasi siskeudes. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak merumuskan masalah terkait kendala atau hambatan penggunaan aplikasi siskeudes.</p>
4	Maulidya Rahmah, 2020.	Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Rahmah dengan penulis yaitu membahas penerapan aplikasi siskeudes.	<p>a. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Rahmah menggunakan teknik analisis tema, sedangkan metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif.</p> <p>b. Penelitian tersebut tidak membahas pengelolaan keuangan Desa.</p>

				<p>c. Penelitian tersebut membahas penerapan siskeudes dengan pengukuran efektifitas, sedangkan penelitian oleh penulis tidak menggunakan pengukuran efektifitas.</p>
5	Yesi Mutia Basril, 2021	“Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor yang Mempengaruhinya”.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mutia Basril dengan penulis yaitu sama-sama membahas pengelolaan keuangan Desa.	<p>a. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mutia Basril menggunakan metode kuantitatif, sedangkan metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif.</p> <p>b. Penelitian tersebut membahas faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak membahas faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa.</p> <p>c. Penelitian tersebut tidak membahas</p>

				penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa.
--	--	--	--	---

Sumber: Data Diolah, 2024.

### E. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dipahami sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman akan judul skripsi, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa definisi yang terdapat dalam pembahasan penelitian ini secara operasional sebagai berikut:

#### 1. Pemerintah Desa

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa dan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi oleh wilayah-wilayah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Pengelolaan keuangan di desa berperan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hal tersebut dipertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun APBDes yang dijelaskan dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu pemerintah desa wajib melaporkan kinerja kepada pemerintah dan

---

<sup>24</sup> UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

masyarakat untuk menunjukkan transaksi suatu laporan keuangan pemerintah desa.<sup>25</sup>

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun tahap pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

### a. Tahap Perencanaan

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes.

### b. Tahap Pelaksanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKPDes dan dianggarkan dalam APBDes. Penggunaan APBDes merupakan dasar pertimbangan dan pertanggungjawaban setiap kegiatan desa yang dilaksanakan untuk membangun desa.

---

<sup>25</sup> KEMENDAGRI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 8-9.

<sup>26</sup> KEMENDAGRI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 21-39.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan pencatatan setiap transaksi keuangan baik berupa penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran dalam buku kas umum. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penatusahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap terjadi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan tahap akhir dari proses pengelolaan keuangan. Pelaporan yang dimaksud dalam hal ini merupakan pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa, yaitu disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

### 3. Aplikasi Siskeudes

Aplikasi siskeudes sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA desa (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Aplikasi ini terlihat sangat baik untuk digunakan, dengan tampilan yang sederhana dan mudah diaplikasikan. Aplikasi ini dirancang dengan menyesuaikan pada proses dan tahap laporan keuangan serta dokumen-dokumen yang ada.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sistem pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dibuatnya aplikasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi tersebut dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan aplikasi Siskeudes dapat mempermudah Pemerintah Desa dalam membuat laporan keuangan desa. Salah satu kelebihan aplikasi Siskeudes adalah tampilan yang mudah digunakan dan dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, implementasi dan manual aplikasi karena pengguna memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Aplikasi Siskeudes ini juga dilengkapi dengan sistem pengendalian internal (*Built-in Internal Control*) untuk meminimalisir kesalahan. Aplikasi siskeudes menggunakan database *Microsoft Access* agar lebih *portable* dan mudah digunakan bahkan untuk pengguna awam

sekalipun. Aplikasi Siskeudes ditujukan untuk aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban.<sup>27</sup>

#### 4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi Amanah dan hak kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban.<sup>28</sup> Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.<sup>29</sup>

*The principle of accountability which demands accountability for how a person or organizational unit uses their authority in managing*

---

<sup>27</sup> BPKP dan KEMENDAGRI, *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES versi 2.0)* tahun 2018, 4.

<sup>28</sup> Iga Vidya Maryanti dan Sugeng Praptoyo, "Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan", Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6, No.2, (Februari, 2017), 4.

<sup>29</sup> Wila Farlina, dkk, "Analysis of Factors that Influence on Reporting of Dana Desa Programs", *e-Journal Apresiasi Ekonomi ISSN Online: 2613-9774*, Vol.7, No. 2, (Mei, 2019), 197.

*resources and achievements in managing resources to the consequences of exercising this authority.*<sup>30</sup> Prinsip akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban bagaimana seseorang atau unit organisasi menggunakan wewenangnya dalam mengelola sumber daya dan prestasi dalam mengelola sumber daya terhadap konsekuensi dari pelaksanaan wewenang tersebut. Akuntabilitas sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Dengan pengelolaan yang baik akan tercipta pemerintahan desa yang baik juga (*good governance*).

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar memperoleh pembahasan yang jelas dan menyeluruh terkait penelitian ini, maka peneliti mengelompokkan penelitian ini menjadi V BAB dengan perincian sebagai berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab I memuat konteks masalah, fokus masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk mendiskripsikan isi dari skripsi, sehingga pembaca akan memiliki gambaran sebelum masuk pada inti pembahasan dan dapat memahami apa yang dimaksud dalam pembahasan berikutnya.

##### **BAB II: Kajian Teori**

---

<sup>30</sup> Ni Wayan Novi Budiasni, "Tansparency and Accountability Based on The Concept of Pada Gelahang" Enhacing Village Financial Management", *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No.3, (2020), 506.

Pada bab ini akan fokus kepada landasan teori berdasarkan literatur yang relevan meliputi; Pemerintah Desa, Pengelolaan keuangan desa, Aplikasi siskeudes, dan Konsep akuntabilitas.

### BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV: Paparan Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dipaparkan data yang didapat dari pembahasan terhadap penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di desa Grujugan kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Bab ini membahas secara umum tentang penelitian. Sub bab pertama membahas profil lokasi penelitian, sub kedua membahas pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Sub ketiga membahas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dan sub bab keempat membahas tentang bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

### BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bagian pokok dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti kepada seluruh pihak yang terkait.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pemerintah Desa

Kata desa berasal dari bahasa Sansakerta yakni *dhesi* yang memiliki arti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.<sup>1</sup> Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa dan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi oleh wilayah-wilayah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Jenis desa sendiri dibagi menjadi dua yaitu desa dan desa adat. Ada banyak penyebutan desa di berbagai wilayah, hal ini disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di wilayah masing-masing. Akan tetapi dalam makna dan garis besar memiliki arti, tugas pokok, dan fungsi yang sama. Desa memiliki karakteristik yang sama di seluruh Indonesia, sedangkan desa adat memiliki karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh adat erhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rudy, *Buku Ajar Pemerintahan Desa* (Lampung: AURA, 2022), 1.

<sup>2</sup> UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>3</sup> Rudy, *Buku Ajar Pemerintahan Desa* (Lampung: AURA, 2022), 2-3.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk mempercepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing Desa. Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:<sup>4</sup>

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Kewajiban Desa adalah:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

## **B. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dengan

---

<sup>4</sup> UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

periodisasi satu tahun anggaran, terhitung sejak 1 januari sampai 31 desember. Hal ini berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun tahap pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### 1. Tahap Perencanaan

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris menyampaikan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) desa tahun berkenaan dan mengikuti pedoman penyusunan APB desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota di setiap tahunnya. Rancangan APBDes yang telah dikordinasikan kemudian disampaikan ke kepala desa yang kemudian oleh kepala desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati bersama dalam musyawarah bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berkenaan. Setelah melakukan musyawarah terkait rancangan APBDes, kepala desa akan menyampaikan hasilnya kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Kemudian kepala desa menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai APBDes melalui media informasi yang di dalamnya memuat APBDes, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.

---

<sup>5</sup> KEMENDAGRI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 21-39.

Perencanaan Pembangunan desa merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat untuk mencapai tujuan Pembangunan desa. Rencana Pembangunan desa yang ditetapkan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan jangka waktu enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu satu tahun.<sup>6</sup>

RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa yang dirumuskan melalui musdes dan musrenbangdes dengan melibatkan unsur masyarakat desa dengan pertimbangan kondisi objektif dan skala prioritas program kegiatan kabupaten/kota.<sup>7</sup>

RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes yang disusun berdasarkan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kota. RKPDes disusun sejak bulan Juli pada tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPDes merupakan acuan dasar dalam menetapkan APBDDes yang ditetapkan berdasarkan musdes dan musrenbangdes.<sup>8</sup>

## 2. Tahap Pelaksanaan/Penganggaran

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan kegiatan yang

---

<sup>6</sup> BPKP, *Modul Pengelolaan Keuangan Desa* (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), 23

<sup>7</sup> Ibid, 24.

<sup>8</sup> Ibid, 30.

telah direncanakan pada penyusunan RKPDes dan dianggarkan dalam APBDes. Penggunaan APBDes merupakan dasar pertimbangan dan pertanggungjawaban setiap kegiatan desa yang dilaksanakan untuk membangun desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.<sup>9</sup> Di dalam APBDes memuat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran atau belanja desa, yaitu:<sup>10</sup>

a. Jenis-jenis Pendapatan

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2) Pendapatan Alokasi Dana Desa dari APBN
- 3) Pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota
- 4) Pendapatan bagian retribusi kabupaten atau kota
- 5) Pendapatan Alokasi Dana Desa
- 6) Pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah

b. Jenis-jenis pengeluaran atau belanja

- 1) Belanja Langsung, meliputi;
  - a) Belanja pegawai/penghasilan tetap
  - b) Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
  - c) Belanja tunjangan

---

<sup>9</sup> Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 44.

<sup>10</sup> Ibid, 45.

- d) Belanja subsidi
  - e) Belanja hibah
  - f) Belanja bantuan sosial
  - g) Belanja bantuan keuangan
  - h) Belanja tidak terduga
- 2) Belanja langsung, meliputi;
- a) Belanja pegawai
  - b) Belanja barang dan jasa
  - c) Belanja modal

Sumber Pendapatan Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), bersumber dari:<sup>11</sup>

- a. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Dana Desa dari APBN.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%).
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).
- e. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

---

<sup>11</sup> UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam hal pelaksanaan Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) merupakan pelaksana kegiatan anggaran dalam penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA), dengan estimasi waktu maksimum 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disusun terdiri dari:

- a. Rencana kegiatan dan anggaran desa

Merinci setiap kegiatan, anggaran yang tertera, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

- b. Rencana kerja kegiatan desa

Merinci tempat/lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

- c. Rencana anggaran biaya

Merinci satuan harga bagi setiap kegiatan. Batas waktu penyerahan rancangan dokumen pelaksana anggaran oleh kaur dan kasi kepada kepala desa adalah enam hari kerja setelah penugasan. Rancangan yang sudah diberikan kemudian akan diverifikasi oleh sekretaris desa maksimal lima belas hari kerja dan akan disetujui oleh kepala desa. Jika terjadi perubahan anggaran atau kegiatan, maka kepala desa akan menugaskan kaur dan kasi pelaksana untuk menyusun rancangan dokumen pelaksana perubahan anggaran (DPPA). Sedangkan untuk

kepala urusan keuangan menyusun rencana anggaran keuangan desa (RAK Desa) berdasarkan dokumen dari pelaksana anggaran. Kemudian kaur dan kasi pelaksana kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan akhir dari realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari sejak kegiatan terlaksana.

### 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan pencatatan setiap transaksi keuangan baik berupa penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran dalam buku kas umum. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap terjadi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Penerimaan desa yang disetor ke rekening desa dapat secara langsung ke bank oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau melalui pihak ketiga. Sedangkan pengeluaran dari APBD dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala desa.

### 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan tahap akhir dari proses pengelolaan keuangan. Pelaporan yang dimaksud dalam hal ini merupakan pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa, yaitu disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan realiasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat secara tertulis melalui beberapa media yang dapat diakses oleh masyarakat.

Selaras dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa harus memenuhi 4 asas, yaitu:<sup>12</sup>

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu wujud tanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang melibatkan kelembagaan dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

---

<sup>12</sup> KEMENDAGRI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 6.

Gambaran siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1.** Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP, 2016.

Dalam beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan Desa, yaitu:<sup>13</sup>

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber anggaran. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dengan jumlah yang cukup dan tidak melaksanakan kegiatan

<sup>13</sup> BPKP, *Modul Pengelolaan Keuangan Desa* (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), 13.

yang belum tersedia dan tidak mencukupi kredit anggaran kredit APBDes/perubahan APBDes

3. Seluruh jumlah penerimaan dan penerimaan desa dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBDes melalui rekening kas Desa.

### C. Aplikasi Siskeudes

Aplikasi merupakan perangkat lunak yang berisi sebuah *coding* atau perintah yang bisa di edit sesuai dengan keinginan pemiliknya.<sup>14</sup> Aplikasi merupakan suatu instruksi berupa perangkat lunak (*software*) yang terdapat dalam sebuah perangkat keras (*hardware*) baik berupa *smarthphone* ataupun komputer dan sejenisnya yang dirancang secara khusus untuk mengolah data masukan (*input*) untuk menghasilkan data keluaran (*output*).

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini mulai diterapkan pada tahun 2015. Hal ini didukung oleh surat Menteri Dalam Negeri nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan surat edaran KPK nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang himbauan terkait pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2018 kemendagri mengeluarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang

---

<sup>14</sup> Syani dan Werstantya, "Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah desa", *ejournal undiksha*, Vol 8, No.2, (2017), 88.

mencabut Permendagri nomor 113 tahun 2014. Sehingga aplikasi siskeudes pada saat itu disesuaikan kembali dengan regulasi tersebut.<sup>15</sup>

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) disiapkan untuk mengantisipasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah pemerintah desa dalam membuat laporan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini memiliki tampilan yang mudah digunakan (*user friendly*) dan dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan. Aplikasi Siskeudes juga dirancang dengan sistem pengendalian internal (*Built-in Internal Control*) untuk meminimalisir kesalahan.

Aplikasi Siskeudes dirancang dengan menggunakan database *Microsoft Acces*, tujuannya agar lebih portable dan mudah diimplementasikan, bahkan untuk pengguna aplikasi yang awam. Secara teknis keuangan desa dikelompokkan dalam keuangan skala kecil, sehingga penanganannya lebih efisien dengan database akses. Namun penggunaan *SQLServer* hanya dikhususkan untuk keperluan tertentu saja atau transaksi sakala menengah saja.<sup>16</sup>

Aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna terutama aparat desa dalam proses pengelolaan keuangan. Dengan penginputan transaksi yang ada dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu:

---

<sup>15</sup> BPKP dan KEMENDAGRI, *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES versi 2.0)* tahun 2018, 4.

<sup>16</sup> Ahmad Basori, *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)* (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Teknis Substantif Pengelolaan Keuangan Desa, 2016)

1. Dokumen penatausahaan
2. Bukti penerimaan
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4. Surat Setoran Pajak (SPP)
5. Dokumen lainnya
6. Laporan-laporan penganggaran (Perdes, ABPDes, RAB, APBDes per sumber dana)
7. Laporan penatausahaan (Buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu, dan register dokumen penatausahaan)

Adapun modul yang terdapat dalam aplikasi sikeudes terkait pengelolaan keuangan desa adalah:<sup>17</sup>

1. Modul Perencanaan

Proses ini mencakup Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk selanjutnya menjadi dasar sebagai perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam perumusan RPJMDes dan RKPDDes pemerintah Desa harus melakukan musyawarah desa dan membentuk tim penyusunan RPJMDes dan RKPDDes yang melibatkan seluruh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat (sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).<sup>18</sup>

2. Modul Penganggaran

---

<sup>17</sup> BPKP dan KEMENDAGRI, *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES versi 2.0)* tahun 2018, 22.

<sup>18</sup> BPKP, *Modul Pengelolaan Keuangan Desa* (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), 27.

Dalam proses ini mencakup input penyusunan APBDes dari hasil ketetapan RKPDes. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang disusun dalam ABPDes dijadikan sebagai rujukan dari proses penganggaran. Output utama dari modul ini adalah APBDes. Adapun waktu penyusunan APBDes adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.** Jadwal waktu penyusunan APBDes

Tahapan	Waktu
Penyampaian pagu indikatif oleh pemerintah kab/kota ke desa	Bulan juli
Penetapan RKPDes	Akhir September
Penyusunan rancangan APBDes	Awal Oktober
Penyepakatan bersama BPD	Akhir Oktober
Penyampaian kepada bupati/walikota melalui camat	Maksimum 3 hari kerja
Proses evaluasi R-APB Desa	Maksimum 20 hari kerja
Proses penyempurnaan	Maksimum 7 hari kerja
Penetapan APB Desa	Maksimum 31 Desember

Sumber: Pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP, 2016.

### 3. Modul Penatausahaan

Modul ini merupakan proses penatausahaan dalam pelaksanaan APBDes yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama modul ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa seperti

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Panjar dan Kuitansi.

#### 4. Modul Pelaporan

Modul ini merupakan menu dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDes dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK). Modul ini juga dilengkapi dengan kompilasi yang menggabungkan seluruh laporan desa-desa yang ada di pemerintah daerah. Dalam modul ini menu penyesuaian digunakan untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan.

### D. Konsep Akuntabilitas

#### 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban para pemegang amanah beserta aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan menyajikan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan atas pertanggungjawaban.<sup>19</sup> Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta

---

<sup>19</sup> Setiana dan Yuliani, "Efektifitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa", 2018p- ISSN 2303-514X e-ISSN 2303-1018.13, 206.

pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.<sup>20</sup>

*The principle of accountability which demands accountability for how a person or organizational unit uses their authority in managing resources and achievements in managing resources to the consequences of exercising this authority.*<sup>21</sup> Prinsip akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban bagaimana seseorang atau unit organisasi menggunakan wewenangnya dalam mengelola sumber daya dan prestasi dalam mengelola sumber daya terhadap konsekuensi dari pelaksanaan wewenang tersebut. Dengan demikian akuntabilitas sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Dengan pengelolaan yang baik akan tercipta pemerintahan desa yang baik juga (*good governance*).

Dalam ilmu administrasi negara, akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu mekanisme kerja atau perilaku sektor publik atau aparatur negara diawasi dan mendapat sanksi apabila melanggar norma-norma masyarakat atau perundang-undangan yang ditetapkan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wila Farlina, dkk, "Analysis of Factors that Influence on Reporting of Dana Desa Programs", *e-Journal Apresiasi Ekonomi ISSN Online: 2613-9774*, Vol.7, No. 2, (Mei, 2019), 197.

<sup>21</sup> Ni Wayan Novi Budiasni, "Tansparency and Accountability Based on the Concept of Pada Gelahang Enhacing Village Financial Management", *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No.3, (2020), 506.

<sup>22</sup> Amir Imbaruddin, *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja* (Makassar: De La Mecca, 2016),

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dengan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Kebutuhan akan akuntabilitas semakin tinggi karena meningkatnya tuntutan para *stakeholder* untuk mewujudkan *good governance*. *Governance* merupakan sistematisasi hubungan antara lembaga-lembaga tinggi termasuk juga hubungan dengan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi. Agar tercipta pemerintahan yang *good governance* maka ada beberapa prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yaitu:<sup>23</sup>

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat, dengan biaya yang terjangkau
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

- e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak berpendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
  - f. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terealisasinya pelayanan terhadap Masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab
  - g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh Masyarakat, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil untuk seluruh pihak tanpa terkecuali serta menjunjung HAM dan memperlihatkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Macam-macam Akuntabilitas

Adapun akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:<sup>24</sup>

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertikal Accountability*)

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada atasan atau otoritas yang lebih tinggi seperti dari unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR, dan sebagainya.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

---

<sup>24</sup> Bevaola Kusumasari, *Akuntabilitas Modul pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), 11.

Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban dari atas ke bawah, yaitu kepada masyarakat, khususnya para penerima layanan lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Adapun indikator dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu:<sup>25</sup>

1. Perumusan rencana keuangan
  2. Pelaksanaan dan pembiayaan
  3. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan
  4. Pelaksanaan pelaporan keuangan
3. Akuntabilitas dalam Islam

Dalam Islam teori akuntabilitas dibahas sebagai sebuah amanah yang di emban oleh seseorang yang diberi tanggung jawab. Sudah seharusnya bagi seorang muslim sejati agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ajaran Islam melarang untuk mengkhianati amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal ayat 27-28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَعَلِمُوا أَنَّ مَا

أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَفِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan

---

<sup>25</sup> Arfiansyah, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, *Journal of Islamic Finance and Economic*, 67.

anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Q.S. Al-Anfaal: 27-28).<sup>26</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai orang Islam yang beriman sangat tidak dibenarkan melakukan tindak penyelewengan amanah. Karena seluruh yang ada di bumi ini merupakan titipan Allah SWT. Sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Shahih Muslim yang artinya:

“Dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda: Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin anggota keluarganya, dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga serta anak suaminya, dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah! Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”<sup>27</sup>

Dari hadits tersebut sudah sangat jelas bahwa seorang yang diberi tanggung jawab atau amanah akan dimintai pertanggungjawaban dari semua yang mereka lakukan.

Dalam hal keuangan akuntabilitas pengelolaan keuangan seyogyanya disampaikan secara transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur’an surah an-nisa’ ayat 58:

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2020), 79.

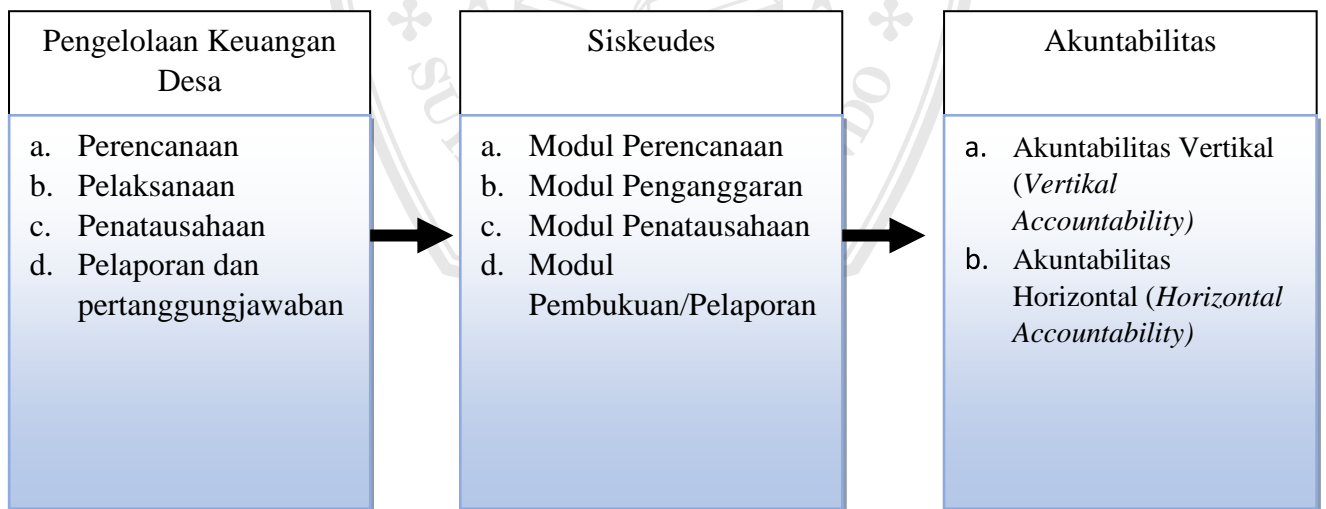
<sup>27</sup> Abu Muhammad Badr Al-Din Al-Hanafi, *Umdah Al-Qari’ Syarh Shahih Muslim*, Juz. II (CD ROM al Maktabah al-Syamilah), 378.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Q.S. An-Nisa’ (4):58.<sup>28</sup>

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah, 2024.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2020), 113.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan membangun sebuah proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Secara definitif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya penelitian, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh (holistik) dan dengan cara deskripsi dalam konteks alamiah. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di peroleh dengan menggunakan statistik atau melalui cara kuantifikasi (pengukuran)<sup>1</sup>

Pola penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Tujuannya adalah mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian secara langsung, sehingga mendapatkan informasi secara langsung terkait pembahasan dari penelitian ini.

#### B. Kehadiran Peneliti

Seorang peneliti yang melakukan penelitian harus hadir ketika proses penelitian tersebut, juga harus tersusun secara sistematis sesuai dengan jadwal

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasan, *Penelitian Kualitatif vs Penelitian Kuantitatif* (Makassar: Tahta Media Group, 2022), 7.

penelitian yang akan dilakukan. Kehadiran peneliti di kantor kepala Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sangatlah penting. Peneliti disini berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan sekaligus melaporkan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti secara langsung di kantor kepala desa terkait penerapan aplikasi siskeudes serta pengelolaan keuangan di desa Grujungan. Dengan begitu, peneliti diharuskan bekerja sama dengan beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan analisis penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Grujungan. Yaitu: kepala desa, sekeretaris, bendahara/kaur keuangan, pendamping desa, BPD, dan juga masyarakat sekitar.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam melaksanakan penelitian ini bertempat di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian, karena lokasi penelitian merupakan sebuah tempat di mana interaksi sosial berlangsung atau sebuah peristiwa penelitian terjadi.

### **D. Sumber Data**

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah sebuah tampilan berupa kata-kata dan tindakan.<sup>2</sup> Selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen, sumber data tertulis, foto dan statistik. Menurut Spradley agar dapat

---

<sup>2</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 157.

memperoleh data yang akurat dalam penelitian dengan metode kualitatif, maka harus memenuhi 3 komponen sebagai berikut:

1. *Place*, yaitu tempat dimana interaksi dalam suatu social berlangsung.
2. *Actor* atau pelaku ialah orang-orang yang sedang memainkan tertentu.
3. *Activity*, yaitu kegiatan yang dilakukan *actor* dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Sumber data yang digunakan sebagai pedoman dalam literatur penelitian diklasifikasikan menurut sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang direncanakan secara cermat dan akan sangat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penelitian:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama di lokasi atau objek penelitian dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.<sup>3</sup> Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan obesrvasi langsung mengenai penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di desa Grujungan kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau sudah dikelola untuk kemudian digunakan.<sup>4</sup> Peneliti akan memanfaatkan data

---

<sup>3</sup> Muhammad Hasan, *Penelitian Kualitatif vs Penelitian Kuantitatif*, 197.

<sup>4</sup> Ibid, 197.

tersebut sesuai kebutuhan. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa, seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dokumen transparansi anggaran, dokumen masukan dan keluaran pada aplikasi siskeudes, serta dokumen pelaporan manual. Data ini digunakan sebagai data pendukung untuk membandingkan hasil wawancara dan observasi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapat data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Instrumen pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrument atau alat bantu dalam mengumpulkan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya.<sup>5</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data

---

<sup>5</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medasn: Febi UIN-SU Press, 2016), 51.

primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. Teknik pengamatan ini melibatkan aktivitas mendengar, membaca, mencium, dan menyentuh. Lebih luas lagi, observasi melibatkan rentang penuh dari kegiatan pemantauan aktivitas dan kondisi perilaku (*behavioral*) ataupun bukan perilaku (*non-behavioral*).<sup>6</sup>

Adapun tujuan data observasi yakni untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar tersebut, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>7</sup> Teknik observasi digunakan apabila penelitian yang dilakukan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan pengamatan secara mendalam terhadap responden.

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan tentang pengelolaan keuangan yang disajikan pada aplikasi sistem keuangan desa (*siskeudes*) mulai dari tahap perencanaan hingga pembukuan atau pertanggungjawaban. Peneliti juga mengamati bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa Grujungan terhadap masyarakat berupa banner yang terpampang di depan kantor desa sebagai informasi terkait APBDes, realisasi APBDes, dan informasi sumber keuangan desa.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang

---

<sup>6</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan (revisi)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 134.

<sup>7</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 146.

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).<sup>8</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Hal ini akan memungkinkan perolehan data langsung dari objek penelitian. Komunikasi yang terjalin antara pewawancara dengan yang diwawancarai bersifat intensif dan masuk pada hal-hal yang bersifat detail. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara rinci terkait penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa Grujugan.

Informan pada penelitian ini khususnya dari pihak terwawancara yaitu, kepala desa Grujugan, sekretaris, bendahara/kaur keuangan, pendamping desa, staf kaur keuangan selaku operator siskeudes, BPD, dan perwakilan masyarakat sekitar.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>9</sup> Dokumentasi dalam hal ini lebih mengacu kepada material (bahan) seperti foto, video, memo, surat, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat dijadikan bahan informasi untuk mengkaji kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hasil

---

<sup>8</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

<sup>9</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan (revisi)*, 139.

dokumentasi berupa perencanaan anggaran desa (APBDes), realisasi anggaran, dokumen RPJMDes serta dokumen *output* dari setiap tahap pengelolaan yang dihasilkan dari aplikasi siskeudes serta dokumentasi lainnya yang mendukung hasil observasi dan wawancara seperti transparansi anggaran sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

#### F. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>10</sup> Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis untuk kemudian disimpulkan agar mudah untuk dipahami.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti menyederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi data merujuk kepada pemilihan,

---

<sup>10</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

pemfokusan, penyederhanaan data mentah yang terjadi dalam catatan penelitian di lapangan.<sup>11</sup> Data yang direduksi dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dan semua data yang telah dikumpulkan terkait penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, data yang sudah berhasil direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kajian penulisan.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau mendisplay data dilakukan setelah mereduksi data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data ini bermaksud untuk menemukan pola-pola bermakna dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya disusun untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk agar mudah dalam penarikan kesimpulan.<sup>12</sup>

Penyajian data dalam penelitian ini didapatkan dari data sekunder dan data primer yang diolah sehingga menghasilkan data untuk mengetahui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

---

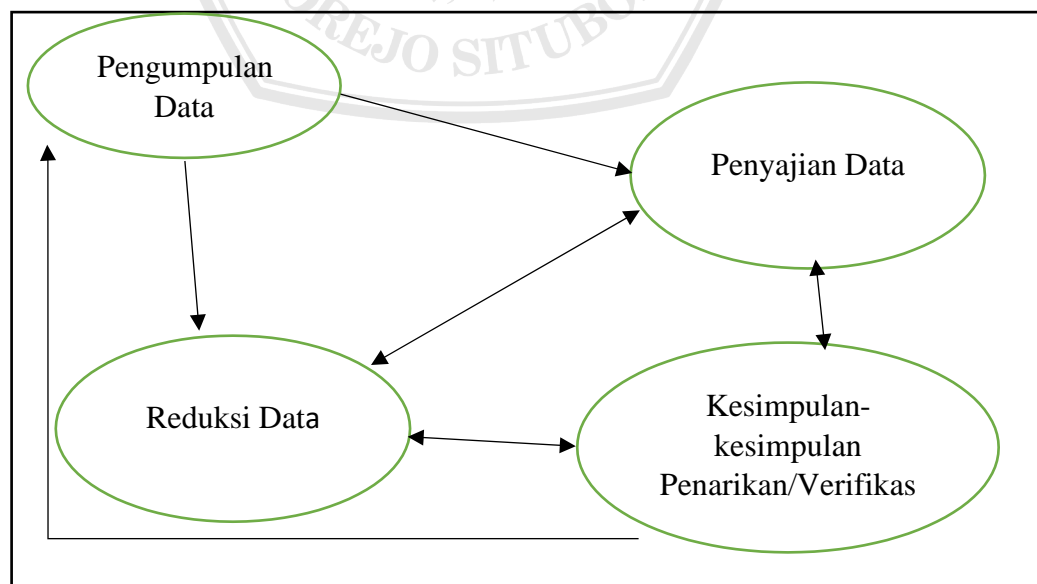
<sup>11</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 243.

<sup>12</sup> Ibid, 249.

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dipaparkan pada tahap awal didukung oleh bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dipaparkan merupakan kesimpulan fleksibel.<sup>13</sup>

Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini didapat setelah mendapatkan perbandingan objek yang diteliti dan dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya jawaban dari narasumber (reduksi data) kemudian dianalisis dengan menggabungkan data yang didapat dari sumber lain (*data display*) agar hasil hasil penelitian lebih relevan.



<sup>13</sup> Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 124.

**Gambar 3.1.** Komponen analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman

Sumber: Data diolah, 2024.

### G. Pengujian Keabsahan Data

Adapun salah satu metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah Validitas yang berfungsi untuk menguji kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti, serta menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya. Untuk menguji kredibilitas pada hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan pengamatan, triangulasi, teman sejawat, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *membercheck*.<sup>14</sup>

Teknik triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.<sup>15</sup> Peneliti menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi merupakan teknik proses pengumpulan data yang lebih kredibel dan akurat. Triangulasi juga diartikan sebagai proses pengecekan data melalui berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Triangulasi Sumber

---

<sup>14</sup> Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Dta Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

<sup>15</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2014), 199.

Triangulasi sumber merupakan suatu cara dengan melakukan pengecekan pada data dari beberapa sumber.<sup>16</sup> Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa metode dan sumber. Misalnya, selain menggunakan wawancara dan observasi, peneliti menggunakan observasi terlibat, dokumentasi, arsip, catatan atau gambar. Peneliti melakukan penelitian tentang analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan.

2. Triangulasi teknik dilakukan dari data yang diperoleh melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hal tersebut dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara yang sama kepada beberapa narasumber dengan teknik yang berbeda.

#### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Agar penelitian dapat dilakukan dengan baik, maka perlu adanya tahapan-tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Tahapan-tahapan penelitian tersebut mencerminkan sisi operasional dan memuat sisi metodologi dan substantif yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, beberapa pakar penelitian kualitatif secara akademis senantiasa berbeda dalam menggunakan langkah penelitiannya. Ada yang mengembangkan dari sisi substansif dan dari sisi logistik operasional.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lukman Waris, *Keabsahan Data Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 184.

<sup>17</sup> Ibid, 324-325.

Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahapan, yaitu rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan laporan penelitian.

#### 1. Rencana Penelitian

Langkah awal dalam melakukan penelitian adalah melakukan rencana penelitian, yaitu melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui dalam memecahkan masalah. Dari sini pula dapat dicari beberapa petunjuk tentang Langkah-langkah yang akan dibuat untuk penelitian yang akan dikembangkan.<sup>18</sup>

Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

- a. Memilih masalah
  - b. Studi pendahuluan
  - c. Merumuskan masalah
  - d. Merumuskan anggapan dasar
  - e. Memilih pendekatan
- #### 2. Pelaksanaan Penelitian

Tahapan dalam melaksanakan penelitian berfungsi agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang memuaskan, karena masing-masing tahapan memiliki kaitan yang saling melengkapi.<sup>19</sup> Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- a. Memiliki latar penelitian dan persiapan diri. Dalam hal ini peneliti harus paham akan latar penelitian terlebih dahulu. Disamping itu,

---

<sup>18</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 12.

<sup>19</sup> Ibid, 18.

peneliti perlu mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun secara mental. Adapun tahap ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu; pembatasan latar dan peneliti, penampilan, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, dan jumlah waktu studi.

- b. Memasuki lapangan. Ketika memasuki lapangan, peneliti perlu membangun hubungan yang baik antara peneliti dan subjek sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah di antara keduanya. Dengan demikian, subjek dengan sukarela dapat menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Tahap ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu keakraban hubungan, mempelajari bahasa, dan peranan peneliti.
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data. Dalam tahapan ini, peneliti hendaknya memperhitungkan keterbatasan waktu, tenaga, dan mungkin biaya sehingga ia tidak sampai terpancing untuk terus mengikuti arus kegiatan masyarakat atau orang pada latar penelitian. Dengan demikian, peneliti bisa berbaur sekaligus mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun dalam tahapan ini terbagi menjadi enam bagian, diantaranya ialah pengarah batas studi, mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, kejenuhan, ketelitian dan istirahat, meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan, serta analisis di lapangan.<sup>20</sup>

### 3. Pelaksanaan Laporan Penelitian

Laporan merupakan langkah yang sangat penting karena dengan

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127.

laporan itu syarat keterbukaan ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dipenuhi. Melalui laporan itu ilmuan lain dapat memahami, menilai, bila perlu menguji kembali hasil-hasil penelitian itu. Dengan demikian pemecahan masalahnya mengalami pematapan dan kemajuan.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Sejarah Desa Grujugan

Grujugan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Sebelah utara dibatasi oleh Desa Banuaju Timur Kecamatan Batang-Batang, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jadung Kecamatan Dungkek, sebelah barat berbatasan dengan Desa Longos Kecamatan Gapura sebelah Selatan berbatasan dengan laut yang menghubungkan dengan laut Jawa.

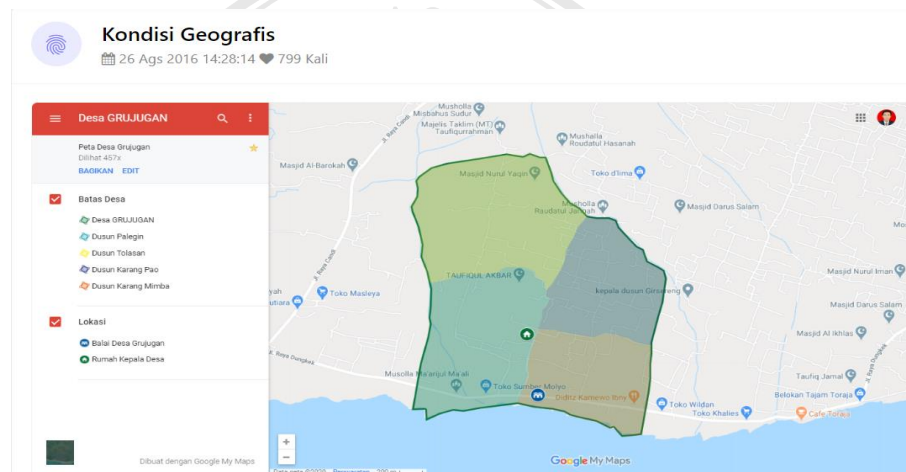
Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Grujugan sebagai petani dan nelayan yang kemudian menjual hasil tangkapannya kepada masyarakat sekitar hingga luar pulau. Selain itu beberapa warga juga bekerja sebagai pedagang, karyawan dan PNS.

Konon nama Grujugan sendiri terlahir dari peristiwa zaman dahulu, yaitu peperangan antara kerajaan Bali dengan Keraton Batu Putih di bawah pimpinan ratu Jelante dan Pamadi. Mereka masuk ke pulau Madura melewati Pantai Dungkek dan Gersik Putih yang kemudian bergerak menuju wilayah barat. Sepanjang perjalanan ke wilayah barat, pasukan dari kerajaan Bali mendapat perlawanan dari masyarakat sekitar dengan melempari mereka dengan batu. Lemparan batu dengan jumlah yang banyak dalam bahasa setempat dikenal dengan

*gerujug*. Grujugan sendiri berarti tempat terjadinya lemparan batu. Oleh karena itu lahirlah Desa Grujugan.<sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis

Desa Grujugan terletak di dataran pesisir dengan jarak dari kota kurang lebih 20 km. Kantor Desa Grujugan terletak di Desa Grujugan, Jl. Raya Dungkek, Km.20. Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Kode Pos 69472. No.Hp 082333147721. mail\_outline [grujugan.gpr@gmail.com](mailto:grujugan.gpr@gmail.com).<sup>2</sup>



**Gambar 4.1.** Peta Letak Geografis Desa Grujugan

Sumber: [www.grujugan-gpr.desa.id](http://www.grujugan-gpr.desa.id)

Desa Grujugan terdiri dari 4 dusun, yaitu:

- a. Dusun Palegin
- b. Dusun Karang Mimba
- c. Dusun Tolasan
- d. Dusun Karang Pao

<sup>1</sup> [www.grujugan-gpr.desa.id](http://www.grujugan-gpr.desa.id) diakses pada 7 Juni 2024

<sup>2</sup> [www.grujugan-gpr.desa.id](http://www.grujugan-gpr.desa.id) diakses pada 7 Juni 2024

### 3. Aspek Demografi

#### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di desa Grujungan berdasarkan data yang ada berjumlah 3.623 jiwa dengan rincian 1.746 laki laki dan 1.877 perempuan.<sup>3</sup>

**Tabel 4.1.** Data penduduk desa Grujungan

No	Wilayah, Kepala/Ketua		KK	L+P	L	P	
1	Dusun Palegin		356	1074	517	557	
	1	RW 001	155	473	221	252	
		1	RT 001	51	144	66	78
		2	RT 002	58	177	86	91
		3	RT 003	46	152	69	83
	2	RW 002		201	601	296	305
		1	RT 004	45	128	65	63
		2	RT 005	47	140	71	69
		3	RT 006	39	109	51	58
		4	RT 007	70	224	109	115
2	Dusun Tolasan		333	1108	531	577	
	1	RW 003	147	493	239	254	
		1	RT 008	42	131	63	68
		2	RT 009	39	135	59	76
		3	RT 010	38	130	71	59
		4	RT 011	28	97	46	51
		2	RW 004	186	615	292	323
		1	RT 012	37	123	62	61
		2	RT 013	45	144	74	70
		3	RT 014	48	167	80	87
	4	RT 015	56	181	76	105	
3	Dusun Karang Pao		241	729	349	380	
	1	RW 005	107	330	157	173	
		1	RT 016	40	135	63	72
		2	RT 017	36	103	52	51
		3	RT 018	31	92	42	50
	2	RW 006	134	399	192	207	

<sup>3</sup> [www.grujungan-gpr.desa.id](http://www.grujungan-gpr.desa.id) diakses pada 7 Juni 2024



#### 4. Visi, Misi dan Nilai

##### a. Visi

Adapun visi dari desa Grujungan adalah “Terwujudnya Masyarakat yang amanah, tertib, Makmur, dan Sejahtera yang didasari semangat religius dan kegotong-royongan”

##### b. Misi

Untuk merealisasikan visi dari desa Grujungan tentunya ada pertimbangan terkait potensi dan hambatan berupa internal maupun eksternal, oleh karena itu disusunlah misi desa grujungan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM atas asas iman dan takwakepada Tuhan yang Maha Esa
- 2) Menumbuh kembangkan potensi masyarakat
- 3) Menjamin dan mendorong usaha agar terciptanya pembangunan berkelanjutan dan terarah pembangunan serta bermanfaat
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak
- 5) Mewujudkan tatanan masyarakat yang di demokratis, transparan dan akuntabel
- 6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

##### c. Nilai-nilai

Beberapa nilai yang dianut oleh desa grujungan untuk mencapai visi tersebut adalah:

- 1) Asas kebersamaan

- 2) Keterbukaan
- 3) Jujur
- 4) Adil
- 5) Demokratis
- 6) Dapat dipertanggungjawabkan

## 5. Struktur Pemerintahan Desa

Desa grujugan memiliki struktural desa yang terdiri dari badan permusyawaratan desa, kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, dan kepala dusun di setiap dusun yang berada di desa grujugan. Struktur pemerintahan desa grujugan dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.3.** Struktur Pemerintahan Desa Grujugan

Sumber: Kantor Desa Grujugan Kecamatan Gapura, 2024.

## 6. Biodata Narasumber

## a. Kepala Desa

Nama : Didik Susanto

Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 27 September 1982

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jl. Raya Dungkek, Dusun Palegin RT 001

RW 001

## b. Sekretaris Desa

Nama : Kipno

Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 30 Januari 1967

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jl. Raya Dungkek, Dusun Palegin RT 002

RW 001

## c. Kepala Urusan Keuangan

Nama : Zahri

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 17 Mei 1976

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. Raya Dungkek, Dusun Palegin RT 002

RW 001

## d. Operator Siskeudes

Nama : Zahri

Tempat/Tanggal Lahir : -

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. Raya Dungkek, Dusun Palegin RT 001  
RW 001

e. Badan Permusyawaratan Desa

Nama : Moh.Amin

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Alamat : Jl. Raya Dungkek, Dusun Karang Pao RT  
016 RW 005

f. Pendamping Desa

Nama : Zubairi, S.Pd

Jabatan : Pendamping Desa

Alamat : Gapura-Sumenep

g. Warga

Nama : Wahed

Jabatan : Warga Desa Grujugan

Alamat : Jl. Raya Dungkek, Dusun Palegin RT001  
RW 001

h. Warga

Nama : Munawar

Jabatan : Warga Desa Grujugan

Alamat : Jl. Raya Dungkek, Dusun Palegin RT 00  
RW 001

## 7. Pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar ialah Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Ada 4 tahap dalam proses pengelolaan keuangan desa Grujugan , yaitu:

### 1) Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dari sebuah proses pengelolaan keuangan. Pada tahap perencanaan Desa Grujugan melakukan perencanaan kegiatan melalui musdes dan musrenbangdes. Hasil dari musdes dan musrenbangdes berupa RPJMDes dan RKPDes. RKPDes ini dipergunakan sebagai acuan dalam RAPBDes. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Zahri, S.Pd. selaku kepala urusan (Kaur) keuangan.

“.....Perencanaan itu biasanya dari bulan Juni sampai September desa grujugan mulai melakukan perencanaan untuk program tahun berikutnya yang di mulai dengan pembentukan tim perencanaan lalu dilanjutkan dengan musdes kemudian musrenbangdes yang hasilnya adalah RKPDes. Baru di akhir itu ada penetapan RKPDes yang sesuai dengan regulasi di permendes 21 dan paling akhir penetapan RKPDes itu 30 September. Yang dijadikan acuan dalam penetapan RKPDes itu adalah RPJMDes. RPJMDes itu menjadi acuan awal untuk jangka waktu 6 tahun ke depan. Dari RPJMDes ini kita amati program kegiatan yang akan menjadi prioritas di tahun berikutnya serta program lainnya yang dibutuhkan atau mendesak yang kemudian disesuaikan dengan pagu anggaran dari pusat. Barulah ditetapkan RKPDes sesuai kesepakatan pada musyawarah perencanaan Pembangunan desa (musrenbangdes). Musyawarah seperti ini diikuti oleh seluruh aparat desa/pemerintah desa, BPD, pendamping desa, kepala dusun

(kadus), RT/RW, perwakilan organisasi yang ada di desa Grujugan, serta tokoh Masyarakat”.<sup>5</sup>

Hal serupa juga dijelaskan oleh Pendamping Desa yaitu Bapak Zubairi, S.Pd. bahwa tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa grujugan melalui tahap musdes dan murenbangdes, setelah seluruh penetapan rencana kegiatan telah tertuang dalam RKPdes maka setelah itu berlanjut kepada pembahasan RAPBDes.

“Saya juga hadir dalam kegiatan perencanaan RPJMDes dan RKPDes yang ditetapkan melalui musdes dan musrenbangdes. Musyawarah ini dilaksanakan pada juni karena terakhir penetapan dan pengumpulan RKPdes itu akhir September. Tapi pada kenyataannya desa pernah terlambat mengumpulkan RKP. Nah baru setelah rencana kegiatan ditetapkan barulah disitu akan muncul pembahasan RAPBDes yang kemudian akan muncul nominal untuk setiap kegiatan itu butuh berapa, yang kemudian disesuaikan dengan pagu anggaran dari pusat”.<sup>6</sup>

Bapak Zahri S.Pd. selaku kaur keuangan di Desa Grujugan juga menambahkan bahwa pencatatan dokumen RPJMDes dan RRPKPDes sebelum dilakukan penginputan ke dalam Siskeudes dilakukan dengan sistem manual menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*.

“.....Hasil RPJMDes dan RKPDes tidak langsung di input di siskeudes, tapi kita catat dulu di excel barulah setelah fix seluruhnya kita input di siskeudes.”<sup>7</sup>

## 2) Pelaksanaan/Penganggaran

---

<sup>5</sup> Zahri, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

<sup>6</sup> Zubairi, *Wawancara*, Sumenep, 4 Juni 2024.

<sup>7</sup> Zahri, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

Setelah RPJM dan RKP disusun proses selanjutnya adalah penyusunan APBDes. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditetapkan dalam RKPDes akan digunakan sebagai acuan dalam proses pengelolaan keuangan pada tahap penganggaran. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zahri, S.Pd. selaku Kaur keuangan Desa Grujugan.

“Kalau penganggaran itu mengacu kepada RKP yang telah ditetapkan. Dari RKP yang sudah ditetapkan itu nanti dimasukkan ke APBDes, nah nanti misal di RKP itu ada 10 kegiatan terus keuangan kita hanya cukup untuk 5 kegiatan, maka 5 kegiatan itu yang kita danai. Jadi tidak semua yang ada di RKPDes itu masuk di APBDes, tergantung dari kekuatan keuangan desa untuk mendanai kegiatan yang ada pada RKPDes”.<sup>8</sup>

Terkait penganggaran keuangan desa penulis juga mewawancarai Bapak Kipno selaku sekretaris desa.

“Kalau di penganggaran itu kegiatan yang tercantum dalam RKP akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan di bidang-bidang. Saya menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran kegiatan atau RAPBDes itu nanti akan dikirim kepada kepala desa dan biasanya di musyawarahkan dengan badan permusyawaratan desa. Setelah rancangan peraturan desa terkait RAPBDes disepakati maka akan dikirimkan ke kecamatan yang selanjutnya diproses ke kabupaten. Dalam waktu 20 hari kerja itu RAPB yang diajukan akan di evaluasi oleh bupati. Kalau ada perbaikan atau rancangan peraturan desa tentang APBDes yang tidak sesuai maka akan ada pemberitahuan dari kecamatan dan harus direvisi paling lama 7 hari kerja. Baru setelah disetujui oleh bupati akan berlaku pagu APBDes”.<sup>9</sup>

Adapun Sumber pendapatan desa di Grujugan diperoleh melalui pendapatan transfer dan non transfer. Sumber pendapatan

---

<sup>8</sup> Zahri, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

<sup>9</sup> Kipno, *Wawancara*, Sumenep, 8 Juni 2024.

asli desa hanya terbatas pada BUMDesa dan tanah kas desa saja sesuai dengan penjelasan Bapak Zahri, S.Pd. selaku kaur keuangan desa Grujugan.

“Pendapatan dana desa kita itu ada yang transfer dan non transfer yang non transfer itu sumbernya dari PaDes (pendapatan asli desa). PaDes kita itu ada 2 sumbernya yaitu dari BUMDES dan pengelolaan tanah kas desa. Kalau yang transfer itu dari ADD dari kabupaten dan DD dari pemerintah pusat, ada juga dari BK (bantuan keuangan) dari daerah dan dari Jawa Timur tapi yang dari BK ini sifatnya tergantung suhu politik Pak Kades dengan pihak ke-tiga dan tidak menentu”.<sup>10</sup>

“Untuk tahun 2023 pendapatan asli desa atau PaDes sebesar Rp. 10.000.000, dari Dana Desa (DD) total Rp. 1.289.202.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 390.817.000, Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten/Kota senilai Rp. 700.000.000 dan pendapatan lain-lain dari hasil hibah senilai Rp.5.319.517.”.<sup>11</sup>

**Tabel 4.2.** Anggaran Pendapatan Desa Grujugan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAHAN DESA GRUJUGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	<b>PENDAPATAN</b>		
2	Pendapatan Asli Desa	Rp 10.000.000,00	
3	Dana Desa	Rp1.289.202.000,00	
4	Alokasi Dana Desa	Rp 390.817.000,00	
5	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 27.266.000,00	
6	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 700.000.000,00	
7	Pendapatan Lain-lain	Rp 5.319.517,00	
	Jumlah Pendapatan	Rp2.422.604.517,00	

Sumber: Data diperoleh dari kantor Desa Grujugan

<sup>10</sup> Zahri, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

<sup>11</sup> Zahri, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

Pengelolaan sumber dana desa dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja desa, baik kebutuhan operasional Desa maupun pembiayaan dan belanja per bidang di pemerintahan Desa.

“Dana desa itu kita pergunakan untuk Pembinaan dan pemberdayaan kalau Pembangunan hanya berapa persen saja. Di tahun ini Pembangunan kita itu sudah menghabiskan 1 M lebih. Seperti untuk dana kesehatan kita itu bisa 100 juta lebih. Karena mobil siaga setiap hari itu jalan untuk membantu mengantar masyarakat ke rumah sakit dan untuk kepentingan lain-lain. Ada makanan untuk balita, lansia, dan termasuk bantuan pada karang taruna”.

**Tabel 4.3.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAHAN DESA GRUJUGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KET
	<b>PENDAPATAN</b>		
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 10.000.000,00	
2	Dana Desa	Rp1.289.202.000,00	
3	Alokasi Dana Desa	Rp 390.817.000,00	
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 27.266.000,00	
5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 700.000.000,00	
6	Pendapatan Lain-lain	Rp 5.319.517,00	
	Jumlah Pendapatan	Rp2.422.604.517,00	
	<b>BELANJA</b>		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 635.767.471,00	
2	Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp1.253.928.000,00	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 262.550.000,00	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 49.200.000,00	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 117.200.000,00	
	Jumlah Belanja	Rp2.318.645.471,00	
	<b>Pembiayaan</b>		
1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 2.778.954,00	



Pencatatan dilakukan oleh kaur keuangan desa setiap kali menerima atau mengeluarkan uang untuk kepentingan desa. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Zahri S.Pd. selaku kaur keuangan desa Grujugan.

“Pencatatannya dilakukan apabila ada transaksi berupa pengeluaran atau penerimaan kas desa. Jadi tidak dicatat secara kumulatif di akhir. Tapi pencatatan ini harus ada buktinya berupa kuitansi atau nota.”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menandakan bahwa pengajuan rencana kegiatan dilakukan oleh pelaksana kegiatan dari bidang-bidang pemerintahan desa yang kemudian dilakukan pencatatan berupa pengeluaran pembiayaan kegiatan desa oleh kaur keuangan atau bendahara desa.

#### 4) Pelaporan/Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan/ pertanggungjawaban ini penulis akan memaparkan mengenai laporan keuangan desa. Laporan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk proses pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD). Perihal tahap pelaporan penulis mewawancari Bapak Didik Susanto selaku Kepala Desa Grujugan.

“Pelaporan keuangan desa itu sudah tersistemisasi dalam aplikasi siskeudes. Jadi tidak ada manipulasi data, karena dari proses awal apbdes sampai pada penarikan atau pengeluaran keuangan desa itu semuanya melalui siskeudes. Jadi pelaporan secara akumulatif itu di akhir sebelum kita lakukan evaluasi terkait seluruh kegiatan

---

<sup>13</sup> Zahri, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

pada tahun ini semisal. Laporan pertanggungjawaban ini nanti akan di monitoring dan di evaluasi oleh kecamatan.”<sup>14</sup>

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Zahri S.Pd selaku Kaur keuangan Desa Grujugan.

“.....Laporan-laporan kegiatan itu dilakukan kolektif di akhir tahun. Jadi pemanfaatan keuangan desa itu hanya 10 hari kerja. Jadi setelah kita menarik uang setelah dalam 10 hari kerja itu sudah harus digunakan dan pekerjaan harus selesai dan laporan sudah harus selesai.....”<sup>15</sup>

#### **8. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep**

Suatu program akan berjalan dengan baik apabila dapat diterapkan oleh target atau sasaran yang menjadi tujuan dari pelaksana program tersebut. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu peneliti akan menjabarkan terkait penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa Grujugan kecamatan Gapura kabupaten Sumenep. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan wawancara dengan beberapa narasumber.

Aplikasi sisekudes di desa grujugan mulai dioperasikan dan diterapkan di desa Grujugan sejak tahun 2017 setelah adanya intruksi dari pemerintah kabupaten untuk menggunakan sistem keuangan desa sebagai alat pengelolaan keuangan desa yang tersistemisasi. Hal ini

---

<sup>14</sup> Didik Susanto, *Wawancara*, Sumenep, 5 Juni 2024.

<sup>15</sup> Zahri, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

sesuai dengan penjelasan Bapak Dedi Kurniawan selaku operator siskeudes.

“Kami baru menggunakan aplikasi siskeudes di desa Grujugan sejak tahun 2017 lalu. Itu pun karena ada intruksi dari pemerintah kabupaten agar seluruh desa diwajibkan untuk menggunakan aplikasi siskeudes ini tapi waktu itu belum efektif karena laporan masih tetap manual”.<sup>16</sup>

Aplikasi siskeudes di desa grujugan dapat di akses oleh kepala desa, kaur keuangan, dan operator siskeudes selaku staf dari kaur keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zahri, S.Pd. selaku kepala urusan (Kaur) keuangan.

“Yang memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes desa grujugan itu bapak Didik selaku kepala desa, tapi kalau bapak kades ini lebih kepada bagian *controlling*. Saya sendiri juga memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes, tapi untuk pengoperasian seluruhnya dipusatkan kepada staf saya selaku operator siskeudes”.<sup>17</sup>

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Dedi Kurniawan selaku operator siskeudes.

“Yang bisa akses itu Kaur Keuangan, Kepala Desa, dan Operator Siskeudes tapi untuk pengoperasian lebih difokuskan pada operator sikeudes”.<sup>18</sup>

Tidak semua struktural desa memiliki akses untuk menggunakan aplikasi siskeudes, dikarenakan untuk pengoperasiannya hanya operator siskeudes yang bisa dan paham terkait penginputan dan alur dari aplikasi siskeudes. Seperti yang diterangkan oleh sekretaris desa Grujugan yaitu Bapak Kipno.

---

<sup>16</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.

<sup>17</sup> Zahri, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

<sup>18</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.

“Kalo masalah Siskeudes saya tidak memiliki akses untuk itu. Karena yang mengerti dengan alurnya adalah kaur keuangan dan operator siskeudes. Di desa, kami fokus dengan job kami masing-masing. Saya tidak tau banyak terkait isi dan alur dari sistem aplikasi keuangan desa tersebut karena yang melakukan bimbingan pelatihan di Pemerintah kabupaten itu ya pak operator”.<sup>19</sup>

Penulis juga mewawancarai ketua BPD terkait akses pada aplikasi siskeudes.

“Kalau kami tidak punya akses masuk aplikasi tersebut. Jadi saya tidak tau apa saja aktivitas dalam aplikasi tersebut.”<sup>20</sup>

Hampir setiap tahun operator siskeudes dan kaur keuangan mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah kabupaten terkait penggunaan aplikasi siskeudes. Dengan adanya pelatihan tersebut memungkinkan operator siskeudes dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Dedi Kurniawan selaku operator siskeudes.

“Hampir setiap tahun pemerintah kabupaten Sumenep melalui DPMD mengadakan pelatihan Siskeudes yang bertempat di DPMD, tapi untuk bagian pengoperasian siskeudes itu ya saya.”<sup>21</sup>

Aparat Desa Grujungan merasa puas dengan adanya aplikasi siskeudes. Karena telah banyak manfaat yang dirasakan seperti memudahkan control ketika salah input, mengakomodir regulasi terkait keuangan desa, sistem pengendalian internal yang membuat lebih efektif daripada sebelum menggunakan siskeudes, meminimalisir kecurangan

---

<sup>19</sup> Kipno, *Wawancara*, Sumenep, 8 Juni 2024.

<sup>20</sup> Moh. Amin, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

<sup>21</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.

dengan sistem yang dipantau oleh pemerintah daerah, dan tidak perlu bersusah payah untuk membuat kolom ataupun garis dengan manual.

“Saya sendiri selaku operator siskeudes merasa aplikasi siskeudes yang dirancang oleh pemerintah ini banyak memberikan manfaat terutama pada pengelolaan keuangan desa. Jadi kita bisa langsung input seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa. Sejauh ini saya sudah mendapatkan pelatihan dari pemerintah kabupaten juga sudah mendapatkan modul penggunaan atau pengoperasian aplikasi siskeudes, sehingga mempermudah dalam melakukan penginputan data dalam aplikasi siskeudes sesuai regulasi.”<sup>22</sup>

Akan tetapi sampai saat ini masih ada kendala yang dirasakan dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes. Hal ini sesuai dengan pemaparan Bapak Dedi Kurniawan selaku operator siskeudes.

“Jaringan internet dan maintenance aplikasi masih jadi kendala penerapan aplikasi siskeudes di desa.”<sup>23</sup>

Aplikasi siskeudes yang digunakan di Desa Grujungan adalah aplikasi sistem keuangan desa versi V2.0.R2.0.5 yang di dalamnya terdapat 4 menu berupa parameter, data entri, laporan, tools, dan menu *help*. Menu parameter merupakan menu administrasi pengguna berupa data umum desa, *password*, dan level pengguna, rekening desa, dan data umum lainnya. Menu data entri merupakan menu tahapan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 4 modul berupa; modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.<sup>24</sup>

a. Modul Perencanaan

---

<sup>22</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.

<sup>23</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.

<sup>24</sup> Observasi, Sumenep, 7 Juni 2024.

Operator Siskeudes menginput hasil musdes dan murenbangdes berupa Visi Misi Desa, RPJMDes, RKPDes, dan ke dalam menu perencanaan dalam aplikasi siskeudes. *Output* dari aplikasi siskeudes pada menu perencanaan adalah data umum Desa, RPJMDes dan RKPDes.<sup>25</sup> Hal ini dijelaskan oleh Bapak Dedi Kurniawan selaku operator siskeudes.

“Kalau perencanaan proses awalnya tetap manual dek. Jadi harus melalui kesepakatan dalam musdes yang kemudian ditetapkan dalam musrenbangdes, baru setelah itu hasilnya yang berupa RPJMDes dan RKPDes saya input ke dalam aplikasi Siskeudes dalam menu perencanaan”.<sup>26</sup>



**Gambar 4.5.** Parameter Perencanaan

Sumber: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Grujungan,  
2024

<sup>25</sup> Observasi, Kantor Desa Grujungan, Sumenep, 7 Juni 2024.

<sup>26</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.

KOD	MIS	KELUAS	MISBUD
01	01	01	01
02	02	02	02
03	03	03	03
04	04	04	04
05	05	05	05
06	06	06	06
07	07	07	07
08	08	08	08
09	09	09	09
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12

**Gambar 4.6.** *Output data tahap perencanaan*

Sumber: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Grujugan,  
2024

b. Modul Penganggaran

Penginputan APBDes dilakukan oleh operator siskeudes Desa Grujugan ke dalam aplikasi siskeudes setelah ditetapkannya perdes tentang APBDes. Penginputan peraturan desa tentang APBDes dilakukan oleh operator siskeudes ke dalam aplikasi siskeudes pada menu penganggaran. Adapun output utama parameter penganggaran adalah anggaran kas desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta penjabaran APBDes.<sup>27</sup> Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Dedi Kurniawan selaku operator siskeudes.

“Kalau peraturan desa terkait RAPBDes sudah final, baru saya input ke aplikasi siskeudes di menu penganggaran”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Observasi, Kantor Desa Grujugan, Sumenep, 7 Juni 2024.

<sup>28</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.



**Gambar 4.7.** Parameter Penganggaran

Sumber: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Grujungan, 2024

KODE IER	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	RETRANGKAR
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.540.377.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.501.317,00	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.551.818.317,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	382.200.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.899.317,00	
5.3.	Belanja Modal	1.340.610.904,00	
5.4.	Belanja Tidak Terutang	117.200.000,00	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.443.010.221,00</b>	
	<b>Saldo (L1) (Defisit)</b>	<b>108.808.096,00</b>	
6.	<b>PENYERTAAN</b>		
6.1.	Pembelian Perumahan	2.778.954,00	
6.1.1.	SLRA Tahun Sediaan	2.778.954,00	
6.2.	Pengeluaran Perumahan	188.728.000,00	
6.2.2.	Pengeluaran Biaya Desa	188.728.000,00	
	<b>PENYERTAAN NETTO</b>	<b>(185.949.046,00)</b>	
	<b>USA LAIN PEMBAYARAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

**Gambar 4.8.** Output data tahap penganggaran

Sumber: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Grujungan, 2024

c. Modul Penatausahaan

Operator siskeudes melakukan penginputan data pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Pengeluaran desa yang di input berupa seluruh pengeluaran baik pembiayaan kegiatan desa maupun

biaya operasional desa. Penulis mewawancarai Bapak Dedi Kurniawan selaku operator siskeudes.

“Pada tahap ini dilakukan penginputan penatausahaan meliputi pemasukan dan pengeluaran pada rekening kas desa. Pengeluaran desa ini untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh bidang-bidang yang ada di pemerintahan desa ataupun kebutuhan operasional desa sesuai dengan perdes tentang APBDes. Lalu uang akan dicairkan dari kaur keuangan berdasarkan SPP yang disetujui oleh kepala desa. Spj kegiatan itu harus dibuat oleh pelaksana kegiatan paling lama 10 hari kerja. Pada tahap ini juga ada input penyetoran pajak dari bukti kuitansi pembayaran SPP tadi.”<sup>29</sup>

*Output* dari tahap ini berupa SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, buku kas umum, buku kas tunai, buku bank, buku panjar, dan kuitansi. Hal ini sesuai dengan observasi dan wawancara pada Bapak Dedi Kurniawan selaku operator siskeudes.

“.....Jadi output pada menu ini sesuai dengan data yang kita input yaitu berupa SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, buku kas umum, buku kas tunai, buku bank, buku panjar, dan kuitansi.”<sup>30</sup>



**Gambar 4.9.** Parameter Penatausahaan

Sumber: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Grujungan,

2024

<sup>29</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.

<sup>30</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Anggaran		Nomor Buku	Saldo	
				1.000.000	2.000.000		1.000.000	2.000.000
1	27/01/2024	A.2.1.01	APBD Desa	100.000.000	0,00	0001/2024/001/001	100.000.000,00	100.000.000,00
2	28/01/2024	A.2.1.01	APBD Desa	1.700.000.000	0,00	0002/2024/001/001	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
3	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	2.700.000.000	0,00	0003/2024/001/001	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
4	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	3.400.000.000	0,00	0004/2024/001/001	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00
5	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	4.100.000.000	0,00	0005/2024/001/001	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
6	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	4.800.000.000	0,00	0006/2024/001/001	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
7	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	5.500.000.000	0,00	0007/2024/001/001	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
8	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	6.200.000.000	0,00	0008/2024/001/001	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00
9	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	6.900.000.000	0,00	0009/2024/001/001	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00
10	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	7.600.000.000	0,00	0010/2024/001/001	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00
11	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	8.300.000.000	0,00	0011/2024/001/001	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00
12	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	9.000.000.000	0,00	0012/2024/001/001	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
13	01/02/2024	A.2.1.01	APBD Desa	9.700.000.000	0,00	0013/2024/001/001	9.700.000.000,00	9.700.000.000,00

Gambar 4.10. Output data tahap penatausahaan

Sumber: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Grujugan, 2024

d. Modul Pembukuan/Pelaporan

Pada modul ini terjadi perbedaan penamaan antara regulasi pemerintah dengan aplikasi Siskeudes. Secara manual tahap ini merupakan tahap pelaporan/pertanggungjawaban, sedangkan dalam aplikasi siskeudes tahap pelaporan/pertanggungjawaban terdapat pada menu pembukuan. Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan dari menu pembukuan/pelaporan ini dihasilkan dari modul penatausahaan dengan penjumlahan otomatis dari sistem aplikasi. Output utama dari menu ini adalah laporan realisasi APBDes. Menu penyesuaian dalam pembukuan/pelaporan ini digunakan untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan.

“Kalau laporan realisasi anggaran APBDes itu sudah otomatis terkoneksi dengan menu penatausahaan. Selain itu pada menu ini juga dilakukan pencatatan saldo aset desa yang nantinya akan menghasilkan output CaLK Namanya yaitu catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan laporan kekayaan milik desa/laporan aset desa. Selain itu juga ada menu penyesuaian, itu

untuk mencatat penambahan atau pengurangan aset di tahun berjalan. *Output* dari menu pelaporan/pertanggungjawaban ini berupa laporan pembukuan. Jadi seluruh laporan terkait ralisasi anggaran per kegiatan atau secara periodik, laporan kekayaan dan lainnya ada di menu ini.”<sup>31</sup>



**Gambar 4.11.** Parameter Pelaporan/Pembukuan  
Sumber: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Grujungan, 2024

Uraian	Sal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lampiran (%)
<b>PEMBELIAN</b>				
Pembelian Aset Tetap	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
Pembelian Tanah				
Dana Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
Dana Desa Bersifat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
Aman Dana Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
Bantuan Operasional Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
Pembelian Lain-lain	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
<b>JASA DAN PEMELIHARAAN</b>				
<b>BEBAN</b>				
Beban Pembelian/Perbaikan/Perawatan/Operasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
Beban Pemeliharaan/Perawatan/Operasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
Beban Pemeliharaan/Perawatan/Operasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
Beban Pemeliharaan/Perawatan/Operasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
Beban Pemeliharaan/Perawatan/Operasi	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	
<b>JANIS BEBAN</b>				
<b>SALDO AWAL (SISWA)</b>				
Pembelian/Perbaikan	2.778.000.000,00	2.778.000.000,00	0,00	
Pembelian/Perbaikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
<b>PEMBELIAN/PERBAIKAN</b>				
<b>REALISASI DESA BEBAN</b>				
	0,00	2.778.000.000,00	2.778.000.000,00	100,00

**Gambar 4.12.** *Output* data tahap pelaporan/pembukuan  
Sumber: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Grujungan, 2024

<sup>31</sup> Dedi Kurniawan, *Wawancara*, Sumenep, 7 Juni 2024.

## 9. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

Akuntabilitas bukan hanya tanggung jawab keuangan secara formal. Tetapi akuntabilitas juga pertanggungjawaban terhadap lingkungan organisasi, yang meliputi masyarakat, pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan. Masyarakat desa berperan dalam Akuntabilitas dana desa karena masyarakat desa selain sebagai penerima program kerja pemerintah desa juga harus memposisikan diri sebagai pemilik kepentingan atau program kerja. Aplikasi siskeudes dirasa mampu untuk menerapkan konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

“Kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan sistem siskeudes ini sangat bagus, jadi sudah sesuai dengan harapan pemerintah dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Modul satu dan lainnya juga berkesinambungan. Lebih memudahkan desa dalam melakukan pelaporan. Seperti yang saya katakan mba kalau sistem ini dipantau langsung oleh pemerintah daerah jadi sangat akuntabel sehingga mampu meminimalisir tindak penyelewengan keuangan desa.”<sup>32</sup>

Ada 2 indikator yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam menganalisa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan., yaitu:

### a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertikal Accountability*)

Bentuk akuntabilitas vertikal yang dilakukan oleh pemerintah desa Grujugan berupa laporan pertanggungjawaban

---

<sup>32</sup> Zubairi, *Wawancara*, Sumenep, 4 Juni 2024.

kegiatan dan aktivitas keuangan serta laporan manual lpj tahunan kepada pihak kabupaten melalui pemerintah kecamatan.

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Zubairi selaku pendamping desa.

“Kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan sistem siskeudes ini sangat bagus, jadi sudah sesuai dengan harapan pemerintah dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Modul satu dan lainnya juga berkesinambungan. Lebih memudahkan desa dalam melakukan pelaporan. Seperti yang saya katakan mba kalau sistem ini dipantau langsung oleh pemerintah daerah jadi sangat akuntabel sehingga mampu meminimalisir tindak penyelewengan keuangan desa. Untuk pelaporan tinggal memposting laporan di siskeudes saja. Nanti data kita masuk ke bagian kabupaten.”<sup>33</sup>

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, Desa Grujugan menyampaikan laporan realisasi penggunaan keuangan desa melalui media website, banner, bahkan ada penyampaian terbuka di balai dengan melibatkan masyarakat.

“Kalau untuk realisasi penggunaan dana atau APBDes itu bisa dilihat melalui website desa, banner dan desa grujugan ini juga melakukan penyampaian secara terbuka atau forum di balai desa dengan menghadirkan unsur masyarakat.”<sup>34</sup>

Selaras dengan hal tersebut, penulis juga mewawancarai Bapak Didik Susanto selaku Kepala Desa Grujugan.

“Transparansi realisasi APBDes Desa kita bisa dilihat oleh seluruh masyarakat melalui banner yang ada di balai desa dan bisa langsung diakses juga melalui website Desa Grujugan.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Zubairi, *Wawancara*, Sumenep, 4 Juni 2024.

<sup>34</sup> Moh. Amin, *Wawancara*, Sumenep, 6 Juni 2024.

<sup>35</sup> Didik Susanto, *Wawancara*, Sumenep, 5 Juni 2024.

Respon masyarakat terkait pengelolaan keuangan sangat beragam. Ada yang mengetahui maksud dari bentuk akuntabilitas dan ada yang tidak tahu menahu seperti keterangan dari beberapa warga.

“Yang saya lihat sekarang desa itu sudah alhamdulillah bagus dari segi administrasi dan keterbukaan pak kades tentang keuangan. Sudah ada penyampaian pertanggungjawaban, di banner juga terpampang, kalo mau lihat di website juga ada.”<sup>36</sup>  
Penulis juga mewawancarai salah satu warga.

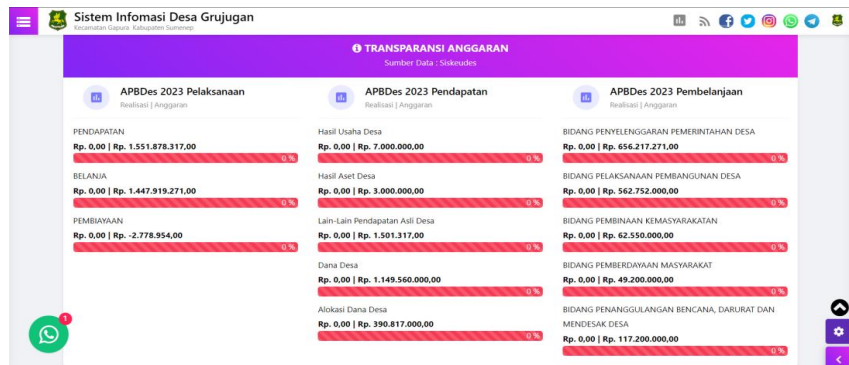
“Saya gak tau dek, karena gak paham tentang begituan.”<sup>37</sup>

Fakta di lapangan mengatakan bahwa meskipun bentuk transparansi dan akuntabilitas telah dilaksanakan oleh aparat desa Grujugan kenyataannya tidak semua warga mengetahui dan peduli terkait pengelolaan keuangan Desa. Hal ini disebabkan kurang adanya rasa antusiasme dan rasa ingin tahu warga dengan pengelolaan keuangan dan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta minimnya pengetahuan tentang hal tersebut. Hanya golongan muda-mudi dan warga yang memiliki latar belakang pendidikan yang paham dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Setidaknya mereka paham maksud dari isi banner terkait transparansi penggunaan keuangan desa.

---

<sup>36</sup> Wahed, *Wawancara*, Sumenep, 9 Juni 2024.

<sup>37</sup> Munawar, *Wawancara*, Sumenep, 9 Juni 2024.



Gambar 4.13. Transparansi anggaran secara online

Sumber: [www.grujugan-gpr.desa.id](http://www.grujugan-gpr.desa.id)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
<b>PENDAPATAN</b>			
PENDAPATAN ASLI DESA	10.000.000	10.000.000	0
PADA DESA	1.000.000.000	1.000.000.000	0
ALOKASI DANA DESA	300.817.000	300.817.000	0
SISWA HASIL PAJAK DAFTAR REtribusi	27.200.000	27.200.000	0
BANTUAN KEKAWAN KABUPATEN/KOTA	700.000.000	700.000.000	0
PENDAPATAN LAIN-LAIN	8.319.817	8.260.440	(59.377)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.428.026.817</b>	<b>2.428.026.817</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	635.767.471	619.888.164	15.879.307
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.253.928.000	1.178.340.345	75.587.655
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	362.000.000	362.000.000	0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	49.200.000	49.200.000	0
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	117.200.000	117.200.000	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.418.095.471</b>	<b>2.326.628.509</b>	<b>91.466.962</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.778.954	2.778.954	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	108.738.000	108.738.000	0

Gambar 4.14. Transparansi anggaran melalui banner

Sumber: (Hasil Observasi)<sup>38</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Grujugan

#### Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa desa Grujugan melaksanakan 4 proses pengelolaan keuangan Desa, yaitu; tahap perencanaan, tahap penganggaran/pelaksanaan, tahap penatausahaan, dan tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Pencatatan

<sup>38</sup> Observasi, Sumenep, 7 Juni 2024.

pada setiap proses pengelolaan keuangan Desa masih dilakukan dengan cara manual terlebih dahulu dengan menggunakan *Microsoft excel*. Pencatatan dilakukan dengan sederhana di dalam *excel*. Pencatatan dari tiap-tiap tahapan pengelolaan secara manual dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian aparat desa sebelum memasukkan data ke dalam aplikasi siskeudes.

Sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan dalam Permendagri No 20 tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran/pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.<sup>39</sup>

Perencanaan pengelolaan keuangan dilakukan melalui musdes dan musrenbangdes dengan mengikutsertakan lapisan unsur masyarakat. Seluruh kegiatan yang dijalankan merupakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan perdes APBDes. Pendapatan asli desa yang diperoleh oleh Desa Grujugan hanya bersumber dari BUMDES dan tanah kas desa.

Pada teorinya pendapatan asli desa dapat diperoleh dari hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong-royong, dan pendapatan lain-lain yang sah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> KEMENDAGRI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 6.

<sup>40</sup> UU No. 6 tahun 2014.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Grujugan telah melakukan tahapan pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan. Tahap perencanaan hingga pelaporan telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang keuangan. Namun Desa Grujugan belum sepenuhnya memaksimalkan perolehan pendapatan asli desa.

## **2. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep**

Aplikasi siskeudes di desa Grujugan kecamatan telah diterapkan di Desa Grujugan pada tahun 2017 setelah adanya intruksi dari pemerintah kabupaten sumenep. Aplikasi siskeudes di operasikan operator siskeudes yang tugasnya adalah mengopersikan aplikasi siskeudes. Pengoperasian aplikasi siskeudes telah dilakukan berdasarkan pelatihan petunjuk pengoperasian yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten melalui DPMD.

Beberapa manfaat yang dirasakan oleh aparat desa dengan penerapan aplikasi siskeudes adalah:

- a. Mempermudah pemerintah desa dengan sistem keuangan desa secara online dan lebih akuntabel
- b. Membantu pendamping desa dalam pendampingan dan pengawasan

- c. Masyarakat dapat melihat hasil pengelolaan keuangan desa dari website desa dan banner.

Adapun pelaksanaan dari pengoperasian aplikasi siskeudes lebih mengarah kepada proses input pengelolaan keuangan yang telah dilakukan secara manual oleh kaur keuangan atau bendahara desa. Peningkatan pengelolaan keuangan dimasukkan pada masing-masing menu pengelolaan sesuai jenis tahapannya. Adapun menu tersebut meliputi menu perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan.<sup>41</sup> Menu pembukuan dalam aplikasi siskeudes ini memuat dokumen pelaporan/pertanggungjawaban.

Pelaporan dan pembukuan keuangan Desa Grujugan telah diterapkan dengan baik dan efektif dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Dalam hal ini sudah terjadi kesesuaian antara fakta dan teori terkait tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Grujugan telah melakukan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa dan input data ke siskeudes sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Faktanya adalah data keluaran pada entri pembukuan atau pelaporan. Jika pada tahap perencanaan tidak dapat menginput data dengan baik, maka tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang baik karena antara satu menu dengan menu yang lainnya pada aplikasi

---

<sup>41</sup> BPKP dan KEMENDAGRI, *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES versi 2.0)* tahun 2018, 22.

siskeudes memiliki keterkaitan antara menu satu dengan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan di Desa Grujungan telah sesuai dengan regulasi yang ada tentang pengelolaan keuangan Desa. Berikut tabel kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Akan tetapi kendala yang masih dialami dalam penerapan aplikasi tersebut adalah gangguan jaringan dan *meintenance*. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka akan mengurangi keefektifan penerapan aplikasi siskeudes. Dimana operator akan terhambat ketika akan menginput data ke dalam aplikasi siskeudes.

**Tabel 4.4.** Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi siskeudes dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Tahap Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Pengelolaan keuangan desa Grujungan dengan aplikasi siskeudes	Hasil
1	Perencanaan	Pemerintah Desa melakukan proses penyusunan rencana pembangunan desa meliputi RPJMDes untuk jangka 6 tahun dan RKPDes untuk satu tahun berdasarkan kesepakatan dalam	Pemerintah desa Grujungan telah melakukan menyusun RPJMDes dan RKPDes melalui musdes dan musrenbangdes. Hasil dari RPJM dan RKP Desa di input oleh	sesuai

		musdes dan musrenbangdes	operator siskeudes pada menu perencanaan	
2	Penganggaran	Sekretaris desa menyusun rancangan APBDes yang mengacu pada RKPDes berdasarkan peraturan Bupati/Walikota.	Sekretaris desa Grujungan telah menyusun APBDes berdasarkan RKP kemudian data diinput oleh operator siskeudes pada menu penganggaran	sesuai
3	Penatausahaan	a. kaur keuangan harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum b. kaur keuangan membuat buku kas pembantu yang meliputi; buku kas pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar	a. kaur keuangan telah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas yang kemudian diinput oleh operator siskeudes pada menu penatausahaan. b. kaur keuangan telah membuat tiga jenis buku kas pembantu yang secara otomatis berdasarkan penginputan transaksi pada menu penatausahaan, yang mana penginputannya dilakukan oleh operator siskeudes	sesuai

4	Pelaporan/ pertanggungja waban	<p>a. Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap tahun anggaran</p> <p>b. laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui beberapa media</p>	<p>a. kepala desa telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kecamatan berdasarkan hasil laporan yang ada di dalam menu pelaporan/pembukuan</p> <p>b. Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada msasyarakat desa melalui media website, banner, dan penyampaian terbuka di balai.</p>	sesuai
---	--------------------------------------	---	---	--------

Sumber: Data diolah, 2024.

### 3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Grujugan dengan aplikasi Siskeudes

Dari tahapan pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes maka Desa grujugan telah memenuhi pertanggungjawaban secara horizontal maupun vertikal. Aplikasi siskeudes dirasa lebih akuntabel dan mampu meminimalisir tindak penyelewengan keuangan Desa. Masyarakat yang merupakan objek dari akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Grujugan tidak seluruhnya memahami makna dari akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa penyampaian

informasi melalui *banner* dan website desa. hal ini disebabkan kurang adanya rasa antusiasme dan rasa ingin tahu warga dengan pengelolaan keuangan dan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta minimnya pengetahuan tentang hal tersebut.

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada atasan atau otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban dari atas ke bawah, yaitu kepada masyarakat.<sup>42</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa Desa Grujungan telah melaksanakan akuntabilitas secara horizontal dan vertikal. Proses dari keseluruhan pertanggungjawaban ini diperoleh dari proses pengelolaan keuangan dalam aplikasi siskeudes yang dituangkan melalui media informasi.

---

<sup>42</sup> Bevaola Kusumasari, *Akuntabilitas Modul pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), 11.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di desa grujugan kecamatan gapura kabupaten sumenep dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan di Desa Grujugan telah memenuhi kriteria pengelolaan keuangan berdasarkan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan di Desa Grujugan dilakukan dengan cara manual terlebih dahulu. Namun Desa Grujugan belum sepenuhnya memaksimalkan pendapatan asli desa.
2. Penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa melalui proses input data ke dalam modul perencanaan, penganggaran/pelaksanaan, pentausahaan, dan pertanggungjawaban/pelaporan. Aplikasi siskeudes yang diterapkan di Desa Grujugan sudah memenuhi standar pengelolaan keuangan sesuai regulasi pemerintahan. Hanya terjadi perbedaan penamaan pada menu pembukuan. Akan tetapi dalam penerapannya masih terjadi kendala berupa gangguan jaringan dan maintenance.
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa setelah diterapkannya aplikasi siskeudes sangat baik. Karena seluruh modul memiliki keterkaitan antar satu dan lainnya yang hasilnya dapat dipantau langsung oleh pemerintah

daerah. Desa Grujugan telah memenuhi standar pertanggungjawaban secara horizontal yakni kepada masyarakat dan vertikal kepada pemerintah kabupaten melalui aplikasi siskeudes. Dengan adanya aplikasi siskeudes dapat membantu proses akuntabilitas menjadi lebih baik secara horizontal maupun vertikal.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Bagi pemerintah Desa Grujugan
  - a. Diharapkan mampu menambah operator siskeudes untuk meringankan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh satu orang operator.
  - b. Agar lebih optimal dalam melakukan tahapan pengelolaan keuangan sehingga laporan dapat dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Diharapkan mampu mengembangkan dan menganalisis pengelolaan keuangan desa dengan cakupan pada tingkat kecamatan.
3. Bagi pemerintah daerah
  - a. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pengawalan yang lebih optimal terkait penggunaan sistem aplikasi siakuedes ini. Perlu dikaji kembali terkait gangguan-gangguan baik berupa jaringan maupun server error saat penginputan data di desa.

- b. Pemerintah mampu memberikan akses siskeudes kepada Badan Permusyawaratan Desa agar mampu menyeimbangkan mobilitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
4. Bagi Masyarakat Desa Grujugan

Seluruh warga harus lebih partisipatif dan aktif tentang pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Setidaknya paham maksud dari transparansi anggaran yang di pampang oleh pemerintah Desa.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Al-Hanafi, Abu Muhammad Badr Al-Din. Umdah Al-Qari' Syarh Shahih Muslim, Juz. II. CD ROM al Maktabah al-Syamilah.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 44.
- Arfiansyah. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terhadap Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa", *Journal of Islamic Finance and Economic*, tt.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES versi 2.0)* tahun 2018.
- Basril, Yesi Mutia. "Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Akuntansi*, Vol.8, No.1, (2021), 48.
- Budiasni, Ni Wayan dan Ayuni, Ni Made Sri. "Transparency and Accountability Based on The Concept of "Pada Gelaang" Enhancing Village Financial Management", *International Journal of Social and Business*, Vol.4, No.3, 2020.
- Basori, Ahmad. *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Teknis Substantif Pengelolaan Keuangan Desa, 2016.
- BPKP dan KEMENDAGRI, *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES versi 2.0)* tahun 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2020.
- Farlina, Wila dkk, "Analysis of Factors that Influence" on Reporting of Dana Desa Programs", *e-Journal Apresiasi Ekonomi ISSN Online: 2613-9774*, Vol.7, No. 2, Mei, 2019.

- Hajar, El Qorina. "Implementasi Siskeudes Dalam Pembangunan Desa Perspektif *Tafwidh* dan *Tanfidzi* Imam Al-Mawardi (Studi di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan)". Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Hasan, Muhammad. *Penelitian Kualitatif vs Penelitian Kuantitatif*. Makassar: Tahta Media Group, 2022.
- Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, Vol.2, No.01, 2016.
- Helaludin dan Wijaya, Hengki. *Analisis Dta Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Praktik* Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan (revisi)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 134.
- Imbaruddin, Amir. *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja*. Makassar: De La Mecca, 2016.
- Jatmiko, Taufik. "Majalah Senator DPDRI edisi juli 2023", dalam [dpd.go.id/media/majalah%20senator%20juli%202023.pdf](http://dpd.go.id/media/majalah%20senator%20juli%202023.pdf) diakses tanggal 22 Januari 2024.
- Kasim, Ibnu. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat)". Skripsi – Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2022.
- KEMENDAGRI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kusumasari, Bevaola. *Akuntabilitas Modul pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2014.
- Maryam, Kamaruddin Sellang, dan Erfina, "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Maiwa", *JIA*, Vol.9, No.3 Desember, 2021.

- Maryanti, dkk. "Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan", Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6, No.2, Februari, 2017.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* Malang: Genius Media, 2014.
- Nurrahmawati, Dwi, dkk. "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Rejosari Kecamatan Pakis", *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol.2, No.2, Juni, 2023.
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Pradono F.C and Basukianto "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2015.
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahmah, Maulidya dan Hayati, Rahmi. "Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong" *JAPB*, Vol. 3, No.2, 2020.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2016.
- Rudy, *Buku Ajar Pemerintahan Desa*. Lampung: AURA, 2022.
- Setiana dan Yuliani. "Efektifitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa", 2018p- ISSN 2303-514X e-ISSN 2303-1018.13.
- Syani dan Werstantya, "Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah desa", *ejournal undiksha*, Vol 8, No.2, 2017.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tribun News Headline, Kabar Madura 23 Januari 2024, diakses pada 05 Februari 2024.
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Waris, Lukman. *Keabsahan Data Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Wibowo, Hadiat Trihutomo, dkk. "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur", *Journal of Social Politics and Governance*, Vol.2, No.2, 2020.

[www.grujugan-gpr.desa.id](http://www.grujugan-gpr.desa.id) diakses pada 7 Juni 2024

Yuliansyah & Rusmianto, *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.



## Lampiran 1

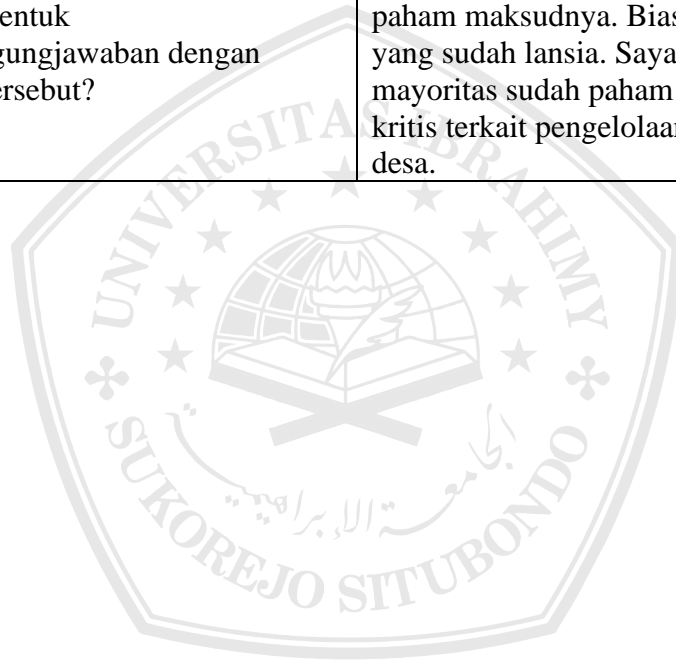
## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan 1		
Nama : Didik Susanto		
Tempat : Kediaman informan		
Waktu : 05 Juni 2024		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan aplikasi siskeudes diterapkan di desa Grujugan?	Aplikasi siskeudes mulai digunakan di desa grujugan itu tahun 2017 di pertengahan bulan
2	Siapa saja yang memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes?	Kalau yang memiliki akses penuh untuk mengoperasikan kita serahkan ke bagian operator. Kalau saya hanya memantau saja.
3	Apakah ada struktur dalam mengelola keuangan pada aplikasi siskeudes?	Tidak ada. Hanya fokus operator saja.
4	Apa tujuan dari penggunaan aplikasi siskeudes menurut bapak?	Adanya siskeudes ini agar pengelolaan keuangan desa lebih baik lagi dan sudah bukan manual lagi.
5	Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes, apa yang digunakan Desa Grujugan dalam pengelolaan keuangan Desa?	Menggunakan excel
6	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes?	Kalau sekarang lebih tersistem dan tidak terlalu memakan waktu banyak. Hanya perlu ketelitian dalam menginput data.
7	Apakah aplikasi siskeudes ini telah memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa?	Iya.
8	Apa saja kelebihan atau manfaat yang dirasakan dengan adanya siskeudes?	Tentunya sangat bermanfaat sekali. Karena lebih terbantu dengan sistem ini. Lebih sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah tentang pengelolaan keuangan. Selain itu juga lebih akuntabel.

9	Menurut bapak apakah aplikasi ini sudah tepat sasaran untuk mewadahi proses pengelolaan keuangan Desa Grujugan?	Menurut saya aplikasi siskeudes ini tentunya sudah tepat sasaran dengan output yang dihasilakn berupa dokumen laporan baik realisasi kegiatan ataupun pertanggungjawaban dan juga mudah di pantau oleh pemerintah kabupaten. Selain itu pelaksanaan pembuatan laporan juga bisa terselesaikan dengan cepat melihat sebelumnya kalau pakai manual bisa sampai seminggu lebih.
10	Apakah aplikasi siskeudes sudah tepat dan berhasil diterapkan dengan efektif di Desa Grujugan?	Alhamdulillah aplikasi ini dapat mewakili seluruh pengelolaan keuangan desa tentu saja dengan regulasi yang sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Di tahun ini seluruh penginputan pada aplikasi siskeudes sudah mulai efektif, karena setiap tahunnya pasti ada pelatihan khusus terkait pengoperasian aplikasi siskeudes mengenai seluruh proses input dan menu-menu yang ada di dalam aplikasi siskeudes jadi misal kalau mau melakukan pencatatan ataupun pengajuan spp dan lainnya itu sekarang sudah tidak kaku lagi. Karena sudah paham terkait post-post apa saja yang ada dalam aplikasi siskeudes.
11	Apakah aplikasi siskeudes lebih akuntabel dalam meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa?	Yang pastinya iya. Karena kan sudah pemerintah yang membuat.
12	Apa saja kendala dari aplikasi siskeudes di Desa Grujugan?	Sejauh ini masih kadang error.
13	Bagaimana bentuk input dan output aplikasi siskeudes?	Kalau nginput ABDes, keluarannya juga laporan APBDes. Jadi sesuai lah dengan data yang diinput
14	Apa Siskeudes ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan Desa?	Siskeudes ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan, tapi harapan kami supaya desa tidak lagi disibukkan dengan lpj manual, karena di siskeudes sudah lengkap. Jadi ketika dana kita laporkan di

		realisasi di siskeudes sudah ada, nota juga sudah ada atas nama siapa. Jadi tidak memakan banyak kertas bahkan printer sampai rusak.
15	Apakah ada pelatihan dan pendampingan dari pemda terkait pengoperasian aplikasi siskeudes?	Di setiap tahunnya ada pelatihan dari kabupaten.
16	Bagaimana tahap perencanaan hingga tahap peleporan pengelolaan keuangan di desa Grujungan?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dari tahap perencanaan itu ada kegiatan musdes dan musrenbangdes untuk penetapan RKPDes. Kan kalau RPJMDes itu di awal periode. Kalau RKP itu kegiatan setiap tahunnya.</li><li>• Kemudian hasil dari ketetapan RKP tersebut untuk dijadikan acuan penganggaran atau APBDes.</li><li>• Baru setelah APBDes fix kemudian barulah kegiatan dilaksanakan. Nah nanti setelah kegiatan dikerjakan harus membuat laporan pertanggung jawaban.</li></ul> Jadi penginputannya juga dilakukan di setiap tahap. Kalau tahap perencanaan misal dari hasil musrenbangdes kan hasilnya RKP nah itu yang kemudian di input ke siskeudes. Dan seterusnya sampai tahap pelaporan. Pelaporan keuangan desa itu sudah tersistemisasi dalam aplikasi siskeudes. Jadi tidak ada manipulasi data, karena dari proses awal apbdes sampai pada penarikan atau pengeluaran keuangan desa itu semuanya melalui siskeudes. Jadi pelaporan secara akumulatif itu di akhir sebelum kita lakukan evaluasi terkait seluruh kegiatan pada tahun ini semisal. Laporan pertanggungjawaban ini nanti akan di monitoring dan di evaluasi oleh kecamatan.
17	Untuk penggunaan aplikasinya sendiri apakah setiap hari, setiap	Setiap transaksi.

	bulan, atau setiap ada pengeluaran?	
18	Keuangan desa di desa Grujugan bersumber dari mana saja?	Dari BUMDES, DD, ADD, BK, juga ada dari tanah kas desa.
19	Sejauh ini bentuk publikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan dengan metode apa kepada masyarakat?	Transparansi realisasi APBDes Desa kita bisa dilihat oleh seluruh masyarakat melalui banner yang ada di balai desa dan bisa langsung diakses juga melalui website Desa Grujugan.
20	Bagaimana respon masyarakat terkait bentuk pertanggungjawaban dengan media tersebut?	Beragam pastinya. Ada yang partisipatif sekali dan ada yang meskipun dipampang di banner gk paham maksudnya. Biasanya itu yang sudah lansia. Saya rasa mayoritas sudah paham dan juga kritis terkait pengelolaan keuangan desa.



### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

<p>Informan 2</p> <p>Nama : Zahri, S.Pd</p> <p>Tempat : Kantor Desa Grujugan</p> <p>Waktu : 06 Juni 2024</p>		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan aplikasi siskeudes diterapkan di desa Grujugan?	Sebelum saya jadi aparat desa itu sudah ada aplikasi ini. Saya jadi aparat itu tahun 2019. Kira-kira sebelum tahun itu.
2	Siapa saja yang memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes?	Yang memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes desa grujugan itu bapak Didik selaku kepala desa, tapi kalau bapak kades ini lebih kepada bagian <i>controlling</i> . Saya sendiri juga memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes, tapi untuk pengoperasian seluruhnya dipusatkan kepada staf saya selaku operator siskeudes
3	Apakah ada struktur dalam mengelola keuangan pada aplikasisiskeudes?	Operator saja.
4	Apa tujuan dari penggunaan aplikasi siskeudes menurut bapak?	Memanager proses pengelolaan keuangan desa.
5	Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes, apa yang digunakan Desa Grujugan dalam pengelolaan keuangan Desa?	Setahu saya masih manual di excel.
6	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes?	Lebih adminisratif dan terstruktur.
7	Apakah aplikasi siskeudes ini	Sudah cukup memenuhi.

	telah memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa?	
8	Apa saja kelebihan atau manfaat yang dirasakan dengan adanya siskeudes?	Lebih terbantu lah. Meski biasanya kita juga punya catatan manualnya. Untuk meminimalisir kalau ada error atau ada kesalahan.
9	Menurut bapak apakah aplikasi ini sudah tepat sasaran untuk mewadahi proses pengelolaan keuangan Desa Grujugan?	Sudah tepat sasaran
10	Apakah aplikasi siskeudes sudah tepat dan berhasil diterapkan dengan efektif di Desa Grujugan?	Iya sudah berhasil diterapkan dengan efektif disetiap kali ada transaksi.
11	Apakah aplikasi siskeudes lebih akuntabel dalam meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa?	Lebih akuntabel.
12	Apa saja kendala dari aplikasi siskeudes di Desa Grujugan?	Sering loading.
13	Bagaimana bentuk input dan output aplikasi siskeudes?	Kan ada 4 menu. Perencanaan, penganggaran, pembukuan, sama pelaporan, jadi inputnya itu disesuaikan. Di perencanaan kalau yang diinput adalah data desa, keluarannya juga laporan informasi data desa seperti visi misi. Untuk lebih jelasnya bisa bertanya langsung ke operator siskeudes.
14	Apa Siskeudes ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan Desa?	Pastinya sangat membantu. jadi dengan sistem ini kita tidak perlu lagi repot-repot masih membuat garis ataupun kolom, hanya bermodal pengetahuan mengoperasikan aplikasi ini
15	Apakah ada pelatihan dan pendampingan dari pemda terkait pengoperasian aplikasi siskeudes?	Ada dari pemda
16	Bagaimana tahap perencanaan hingga tahap peleporan pengelolaan keuangan di desa Grujugan?	Saya fokus secara umum. Kalau detail inputnya bisa langsung konfirmasi staf saya bagaian operator siskeudes. <ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan itu biasanya dari bulan Juni sampai September desa grujugan mulai melakukan perencanaan untuk program tahun berikutnya yang di mulai</li></ul>

		<p>dengan pembentukan tim perencanaan lalu dilanjutkan dengan musdes kemudian musrenbangdes yang hasilnya adalah RKPDes. Baru di akhir itu ada penetapan RKPDes yang sesuai dengan regulasi di permendes 21 dan paling akhir penetapan RKPDes itu 30 September. Yang dijadikan acuan dalam penetapan RKPDes itu adalah RPJMDes. RPJMDes itu menjadi acuan awal untuk jangka waktu 6 tahun ke depan. Dari RPJMDes ini kita amati program kegiatan yang akan menjadi prioritas di tahun berikutnya serta program lainnya yang dibutuhkan atau mendesak yang kemudian disesuaikan dengan pagu anggaran dari pusat. Barulah ditetapkan RKPDes sesuai kesepakatan pada musyawarah perencanaan Pembangunan desa (musrenbangdes). Musyawarah seperti ini diikuti oleh seluruh aparat desa/pemerintah desa, BPD, pendamping desa, kepala dusun (kadus), RT/RW, perwakilan organisasi yang ada di desa Grujugan, serta tokoh Masyarakat.</p> <p>Hasil RPJMDes dan RKPDes tidak langsung di input di siskeudes, tapi kita catat dulu di excel barulah setelah fix seluruhnya kita input di siskeudes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalau penganggaran itu mengacu kepada RKP yang telah ditetapkan. Dari RKP yang sudah ditetapkan itu nanti dimasukkan ke APBDes, nah nanti misal di RKP itu ada 10 kegiatan terus keuangan kita hanya cukup untuk 5 kegiatan, maka 5 kegiatan itu</li></ul>
--	--	--

		<p>yang kita danai. Jadi tidak semua yang ada di RKPDes itu masuk di APBDes, tergantung dari kekuatan keuangan desa untuk mendanai kegiatan yang ada pada RKPDes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Di tahap penatausahaan seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan desa dicatat secara manual dulu di excel sebelum di input ke siskeudes untuk menghindari adanya kesalahan input data. Karena kalau sudah salah input akan lebih memakan waktu.</li><li>• Baru hasil pelaporan dan pertanggungjawaban akan dilaporkan ke kecamatan sebagai laporan baik triwulan, semesteran atau pertahun di akhir secara kumulatif. Jadi, Laporan-laporan kegiatan itu dilakukan kolektif di akhir tahun. Jadi pemanfaatan keuangan desa itu hanya 10 hari kerja. Jadi setelah kita menarik uang setelah dalam 10 hari kerja itu sudah harus digunakan dan pekerjaan harus selesai dan laporan sudah harus selesai. Karena sekarang kita statusnya adalah desa mandiri, maka desa menerima dana itu 60% dan 40% jadi terima 2 kali. Di setelah 60 % kita tarik, maka akan ada monitoring dari kecamatan.</li></ul>
17	Untuk penggunaan aplikasinya sendiri apakah setiap hari, setiap bulan, atau setiap ada pengeluaran?	Pencatatannya dilakukan apabila ada transaksi berupa pengeluaran atau penerimaan kas desa. Jadi tidak dicatat secara kumulatif di akhir. Tapi pencatatan ini harus ada buktinya berupa kuitansi atau nota.
18	Keuangan desa di desa Grujugan bersumber dari mana saja?	Pendapatan dana desa kita itu ada yang transfer dan non transfer yang non transfer itu sumbernya dari PaDes (pendapatan asli desa). PaDes kita itu ada 2 sumbernya yaitu dari

		<p>BUMDES dan pengelolaan tanah kas desa. Kalau yang transfer itu dari ADD dari kabupaten dan DD dari pemerintah pusat, ada juga dari BK (bantuan keuangan) dari daerah dan dari Jawa Timur tapi yang dari BK ini sifatnya tergantung suhu politik Pak Kades dengan pihak ke-tiga dan tidak menentu. Jadi untuk tahun 2023 pendapatan asli Desa atau PaDes sebesar Rp. 10.000.000, dari Dana Desa (DD) total Rp. 1.289.202.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 390.817.000, Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten/Kota senilai Rp. 700.000.000 dan pendapatan lain-lain dari hasil hibah senilai Rp. 5.319.517.</p>
19	<p>Keuangan Desa dipergunakan untuk pembiayaan apa saja Pak?</p>	<p>Dana desa itu kita pergunakan untuk Pembinaan dan pemberdayaan kalau Pembangunan hanya berapa persen saja. Di tahun ini Pembangunan kita itu sudah menghabiskan 1 M lebih. Seperti untuk dana Kesehatan kita itu bisa 100 juta lebih. Karena mobil siaga setiap hari itu jalan untuk membantu mengantar masyarakat ke rumah sakit dan untuk kepentingan lain-lain. Ada makanan untuk balita, lansia, dan termasuk bantuan pada Karang Taruna.</p>
19	<p>Sejauh ini bentuk publikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan dengan metode apa kepada masyarakat?</p>	<p>Ada banner yang dipampang disini. Bisa dilihat di website desa juga, kami juga sampaikan secara terbuka laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan ke masyarakat.</p>
20	<p>Bagaimana respon masyarakat terkait bentuk pertanggungjawaban dengan media tersebut?</p>	<p>Macam-macam. Tapi masyarakat itu paham kalau itu informasi penggunaan keuangan desa.</p>

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan 3		
Nama : Dedi Kurniawan		
Tempat : Kantor Desa Grujugan		
Waktu : 07 Juni 2024		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan aplikasi siskeudes diterapkan di desa Grujugan?	Kami baru menggunakan aplikasi siskeudes di desa Grujugan sejak tahun 2017 lalu. Itu pun karena ada intruksi dari pemerintah kabupaten agar seluruh desa diwajibkan untuk menggunakan aplikasi siskeudes ini tapi waktu itu belum efektif karena laporan masih tetap manual.
2	Siapa saja yang memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes?	Yang bisa akses itu Kaur Keuangan, Kepala Desa, dan Operator Siskeudes tapi untuk pengoperasian lebih difokuskan pada operator sikeudes
3	Apakah ada struktur dalam mengelola keuangan pada aplikasisiskeudes?	Gak ada.
4	Apa tujuan dari penggunaan aplikasi siskeudes menurut bapak?	Aplikasi ini digunakan pemerintah desa untuk mengelola keuangan di desa.
5	Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes, apa yang digunakan	Pakek excel

	Desa Grujugan dalam pengelolaan keuangan Desa?	
6	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes?	Saya sendiri selaku operator siskeudes merasa aplikasi siskeudes yang dirancang oleh pemerintah ini banyak memberikan manfaat terutama pada pengelolaan keuangan desa. Jadi kita bisa langsung input seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa. Sejauh ini saya sudah mendapatkan pelatihan dari pemerintah kabupaten juga sudah mendapatkan modul penggunaan atau pengoperasian aplikasi siskeudes, sehingga mempermudah dalam melakukan penginputan data dalam aplikasi siskeudes sesuai regulasi
7	Apakah aplikasi siskeudes ini telah memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa?	Siskeudes ini telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi dengan desktop aplikasi serta memiliki sistem pengendalian inter yang melekat dan lebih efektif dalam menghasilkan informasi keuangan desa daripada sebelum menggunakan aplikasi siskeudes
8	Apa saja kelebihan atau manfaat yang dirasakan dengan adanya siskeudes?	Aplikasi ini lebih mempermudah kami dengan menggunakan sebuah sistem keuangan desa yang online dan lebih akuntabel. Selain itu aplikasi ini juga sangat berguna untuk masyarakat desa, agar masyarakat dapat melihat hasil pengelolaan keuangan desa dari siskeudes yang di upload melalui website.
9	Menurut bapak apakah aplikasi ini sudah tepat sasaran untuk mewadahi proses pengelolaan keuangan Desa Grujugan?	<i>Output</i> yang dihasilkan dalam aplikasi ini sudah tepat sasaran. Karena memang program atau aplikasi ini dirancang sesuai regulasi tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi semisal kita melakukan input terkait perdes tentang APBDes lalu <i>output</i> yang dihasilkan adalah perdes APBDes.

10	Apakah aplikasi siskeudes sudah tepat dan berhasil diterapkan dengan efektif di Desa Grujugan?	Kalau penerapannya sudah efektif kita rutin. Tapi kalau dari programnya itu kadang ada trouble.
11	Apakah aplikasi siskeudes lebih akuntabel dalam meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa?	Iya lebih akuntabel
12	Apa saja kendala dari aplikasi siskeudes di Desa Grujugan?	Jaringan internet dan maintenance aplikasi masih jadi kendala penerapan aplikasi siskeudes di desa
13	Bagaimana bentuk input dan output aplikasi siskeudes?	Dalam aplikasi Siskeudes terdapat beberapa fitur dalam aplikasi yang dibuat secara sederhana dan memudahkan pengguna, terlebih saya dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dan <i>output</i> aplikasi ini berupa Perencanaan, perdes, APBDes, Perkades, penjabaran APBDes, dokumen penatausahaan keuangan desa, laporan realisasi APBDes, dan lainnya
14	Apa Siskeudes ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan Desa?	Sangat membantu sekali
15	Apakah ada pelatihan dan pendampingan dari pemda terkait pengoperasian aplikasi siskeudes?	Hampir setiap tahun pemerintah kabupaten Sumenep melalui DPMD mengadakan pelatihan Siskeudes yang bertempat di DPMD, tapi untuk bagian pengoperasian siskeudes itu ya saya.
16	Bagaimana tahap perencanaan hingga tahap peleporan pengelolaan keuangan di desa Grujugan?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kalau perencanaan proses awalnya tetap manual dek. Jadi harus melalui kesepakatan dalam musdes yang kemudian ditetapkan dalam musrenbangdes, baru setelah itu hasilnya yang berupa RPJMDes dan RKPDes saya input ke dalam aplikasi Siskeudes dalam menu perencanaan.</li><li>• Di tahap penganggaran, kalau peraturan desa terkait RAPBDes sudah final, baru saya input ke</li></ul>

		<p>aplikasi siskeudes di menu penganggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada tahap ini dilakukan penginputan penatausahaan meliputi pemasukan dan pengeluaran pada rekening kas desa. Pengeluaran desa ini untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh bidang-bidang yang ada di pemerintahan desa ataupun kebutuhan operasional desa sesuai dengan perdes tentang APBDes. Lalu uang akan dicairkan dari kaur keuangan berdasarkan SPP yang disetujui oleh kepala desa. Spj kegiatan itu harus dibuat oleh pelaksana kegiatan paling lama 10 hari kerja. Pada tahap ini juga ada input penyeteroran pajak dari bukti kuitansi pembayaran SPP tadi. Jadi output pada menu ini sesuai dengan data yang kita input yaitu berupa SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, buku kas umum, buku kas tunai, buku bank, buku panjar, dan kuitansi.</li><li>• Kalau laporan realisasi anggaran APBDes itu sudah otomatis terkoneksi dengan menu penatausahaan. Selain itu pada menu ini juga dilakukan pencatatan saldo aset desa yang nantinya akan menghasilkan <i>output</i> CaLK Namanya yaitu catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan laporan kekayaan milik desa/laporan asset desa. Selain itu juga ada menu penyesuaian, itu untuk mencatat penambahan atau pengurangan aset di tahun berjalan. <i>Output</i> dari menu pelaporan/pertanggungjawaban ini berupa laporan pembukuan.</li></ul>
--	--	---

		Jadi seluruh laporan terkait realisasi anggaran per kegiatan atau secara periodik, laporan kekayaan dan lainnya ada di menu ini.
17	Untuk penggunaan aplikasinya sendiri apakah setiap hari, setiap bulan, atau setiap ada pengeluaran?	Setiap ada transaksi
18	Keuangan desa di desa Grujugan bersumber dari mana saja?	Dari ADD, DD, BUMDES juga, terus BK.
19	Sejauh ini bentuk publikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan dengan metode apa kepada masyarakat?	Website, banner, dan informasi terbuka di balai desa.
20	Bagaimana respon masyarakat terkait bentuk pertanggungjawaban dengan media tersebut?	Ada yang partisipatif, ada yang kritis juga, dan ada yang tidak paham kalau yang sudah usia lanjut itu mungkin sudah tidak terlalu memperhatikan. Untuk keseluruhan sudah mayoritas paham dan memberikan respon positif.

### TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Informan 4		
Nama : Kipno		
Tempat : Kediaman Informan		
Waktu : 08 Juni 2024		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan aplikasi siskeudes diterapkan di desa Grujugan?	Kalo tidak keliru 2017-2018
2	Siapa saja yang memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes?	Kalo masalah Siskeudes saya tidak memiliki akses untuk itu. Karena yang mengerti dengan alurnya adalah kaur keuangan dan operator siskeudes. Di desa, kami fokus dengan job kami masing-masing.

		Saya tidak tau banyak terkait isi dan alur dari sistem aplikasi keuangan desa tersebut karena yang melakukan bimbingan pelatihan di Pemerintah kabupaten itu ya pak operator
3	Apakah ada struktur dalam mengelola keuangan pada aplikasisiskeudes?	Tidak ada
4	Apa tujuan dari penggunaan aplikasi siskeudes menurut bapak?	Agar pengelolaan keuangan desa lebih tertata dan tersistem. Jadi bisa dipantau sama pemda.
5	Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes, apa yang digunakan Desa Grujugan dalam pengelolaan keuangan Desa?	-
6	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes?	-
7	Apakah aplikasi siskeudes ini telah memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa?	sudah
8	Apa saja kelebihan atau manfaat yang dirasakan dengan adanya siskeudes?	-
9	Menurut bapak apakah aplikasi ini sudah tepat sasaran untuk mewadahi proses pengelolaan keuangan Desa Grujugan?	Iya sudah tepat
10	Apakah aplikasi siskeudes sudah tepat dan berhasil diterapkan dengan efektif di Desa Grujugan?	Sudah efektif
11	Apakah aplikasi siskeudes lebih akuntabel dalam meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa?	Iya jauh lebih akuntabel
12	Apa saja kendala dari aplikasi siskeudes di Desa Grujugan?	-
13	Bagaimana bentuk input dan output aplikasi siskeudes?	-
14	Apakah Siskeudes ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan Desa?	iya
15	Apakah ada pelatihan dan pendampingan dari pemda terkait pengoperasian aplikasi siskeudes?	Ada dari pemda

16	Bagaimana tahap perencanaan hingga tahap peleporan pengelolaan keuangan di desa Grujugan?	Kalau di penganggaran itu kegiatan yang tercantum dalam RKP akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan di bidang-bidang. Saya menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran kegiatan atau RAPBDes itu nanti akan dikirim kepada kepala desa dan biasanya di musyawarahkan dengan badan permusyawaratan desa. Setelah rancangan peraturan desa terkait RAPBDes disepakati maka akan dikirimkan ke kecamatan yang selanjutnya diproses ke kabupaten. Dalam waktu 20 hari kerja itu RAPB yang diajukan akan di evaluasi.
17	Untuk penggunaan aplikasinya sendiri apakah setiap hari, setiap bulan, atau setiap ada pengeluaran?	-
18	Keuangan desa di desa Grujugan bersumber dari mana saja?	Dari pendapatan asli desa dan dari pemerintah
19	Sejauh ini bentuk publikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan dengan metode apa kepada masyarakat?	Penyampaian langsung di balai, banner, sama website resmi desa yang sekarang akan diperbarui tampilannya.
20	Bagaimana respon masyarakat terkait bentuk pertanggungjawaban dengan media tersebut?	Beda-beda. Ada yang responnya baik dan ada yang biasa saja.

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan 5		
Nama : Zubairi, S.Pd.		
Tempat : Kediaman Informan		
Waktu : 04 Juni 2024		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan aplikasi siskeudes diterapkan di desa Grujugan?	2017

2	Siapa saja yang memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes?	Siskeudes itu yg bisa akses ke dalam hanya operator saja. Kalau kita sebagai pendamping desa kita bisa masuk ke aplikasi siskeudes hanya bagian luar saja untuk mengawasi. Semisal mau buka apbdes itu kita bisa dang gk sampai di detail yg terdalam. Cuma kalau sampai mau mengubah atau mengedit itu hanya operator. Karena memang beda password.
3	Apakah ada struktur dalam mengelola keuangan pada aplikasisiskeudes?	Gk ada structural khusus, hanya operator saja.
4	Apa tujuan dari penggunaan aplikasi siskeudes menurut bapak?	Menurut saya selaras dengan tujuan dari pemerintah membuat sistem ini untuk memeperbaiki management keuangan desa.
5	Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes, apa yang digunakan Desa Grujugan dalam pengelolaan keuangan Desa?	excel
6	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes?	Kalau dulu sebelum adanya siskeudes itu lebih merepotkan dan tidak efektif karena menggunakan excel yang tidak memiliki control keamanan yang bisa di pantau oleh pemerintah. Selain itu kalau menggunakan excel kan pasti ada rumus-rumusny. Kalau bukan ahlinya ya pasti tidak akan berjalan dengan benar. Sebenarnya itu yang menjadi kendala sebelum adanya aplikasi siskeudes.
7	Apakah aplikasi siskeudes ini telah memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa?	Sudah sesuai permendagri.
8	Apa saja kelebihan atau manfaat yang dirasakan dengan adanya siskeudes?	Aplikasi ini sangat membantu kami dalam proses pendampingan sekaligus pengawasan. Karena ketika dimintai laporan kita bisa <i>crosscheck</i> dan memadukan dengan fakta-fakta

		<p>keadaan di lapangan apakah benar-benar dikerjakan atau tidak. Membuktikan apakah yang dilaporkan di siskeudes itu benar-benar dikerjakan atau tidak. Maka dari itu di tingkat pengawasan ada tindak monitoring dan evaluasi kegiatan dan itu biasanya kami laksanakan 2 kali dalam satu tahun. Biasanya kami pendamping desa bersama pemerintah kecamatan mengadakan monitoring untuk memeriksa siskeudes dan juga spj manual kemudian kita sandingkan dengan hasil kegiatan di lapangan.</p>
9	<p>Menurut bapak apakah aplikasi ini sudah tepat sasaran untuk mewadahi proses pengelolaan keuangan Desa Grujugan?</p>	<p>Sudah tepat sasaran.</p>
10	<p>Apakah aplikasi siskeudes sudah tepat dan berhasil diterapkan dengan efektif di Desa Grujugan?</p>	<p>Secara pelaporan itu siskeudes ini sangat efektif untuk membantu pengelolaan keuangan. Karena akan mempermudah control ketika ada kesalahan input. Karena aplikasi siskeudes ini bukan hanya di pantau oleh pemerintah kabupaten tapi juga di pantau oleh badan pengawas keuangan yang fungsinya untuk meminimalisir tindakan kecurangan anggaran. Karena di sistem itu ketika kita mengelola anggaran dan melakukan perubahan itu akan update bersama tanggal di editnya.</p>
11	<p>Apakah aplikasi siskeudes lebih akuntabel dalam meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa?</p>	<p>Kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan sistem siskeudes ini sangat bagus, jadi sudah sesuai dengan harapan pemerintah dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Modul satu dan lainnya juga berkesinambungan. Lebih memudahkan desa dalam melakukan pelaporan. Seperti yang saya katakan mba kalau sistem ini dipantau langsung oleh pemerintah daerah jadi sangat akuntabel sehingga mampu meminimalisir</p>

		tindak penyelewengan keuangan desa
12	Apa saja kendala dari aplikasi siskeudes di Desa Grujugan?	Lebih ke gangguan dari servernya.
13	Bagaimana bentuk input dan output aplikasi siskeudes?	Kalau outputnya sesuai menu-menu yang tersedia di aplikasinya.
14	Apa Siskeudes ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan Desa?	iya
15	Apakah ada pelatihan dan pendampingan dari pemda terkait pengoperasian aplikasi siskeudes?	ada
16	Bagaimana tahap perencanaan hingga tahap peleporan pengelolaan keuangan di desa Grujugan?	Saya juga hadir dalam kegiatan perencanaan RPJMDes dan RKPDes yang ditetapkan melalui musdes dan musrenbangdes. Musyawarah ini dilaksanakan pada juni karena terakhir penetapan dan pengumpulan RKPdes itu akhir September. Tapi pada kenyataannya desa pernah terlambat mengumpulkan RKP. Nah baru setelah rencana kegiatan ditetapkan barulah disitu akan muncul pembahasan RAPBDes yang kemudian akan muncul nominal untuk setiap kegiatan itu butuh berapa, yang kemudian disesuaikan dengan pagu anggaran dari pusat
17	Untuk penggunaan aplikasinya sendiri apakah setiap hari, setiap bulan, atau setiap ada pengeluaran?	Kalau pendamping desa ketika akan mengontrol di siskeudes.
18	Keuangan desa di desa Grujugan bersumber dari mana saja?	Untuk dana desa itu sumbernya ada yang dari apbn, ada alokasi dana desa dari pemerintah daerah
19	Sejauh ini bentuk publikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan dengan metode apa kepada masyarakat?	Di Grujugan sendiri sudah ada website nya bisa di publish disana. Juga banner, dan laporan terbuka dengan masyarakat.
20	Bagaimana respon masyarakat terkait bentuk pertanggungjawaban dengan media tersebut?	Fariatif sekali.

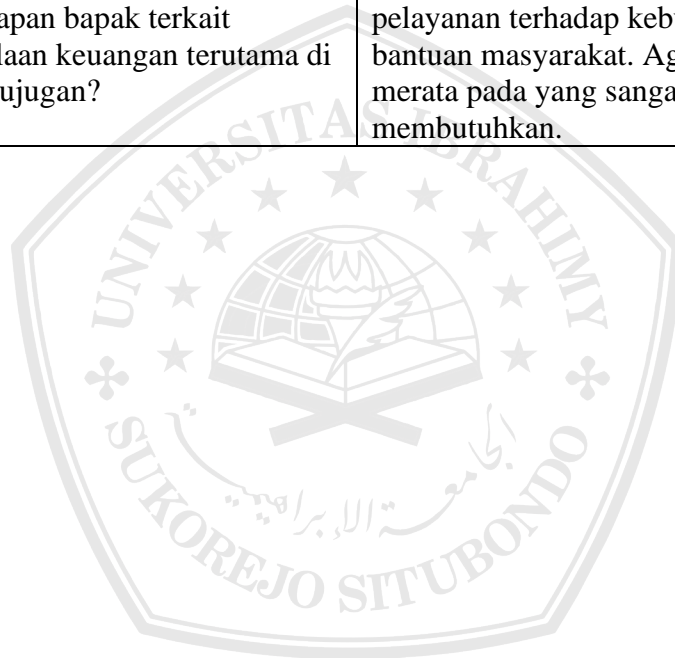
21	Apakah ada controlling tentang pengelolaan keuangan desa?	Biasanya kami pendamping desa bersama pemerintah kecamatan mengadakan monitoring untuk memeriksa siskeudes dan juga spj manual kemudian kita sandingkan dengan hasil kegiatan di lapangan. Monitoring dan evaluasi kegiatan biasanya kami laksanakan 2 kali dalam satu tahun pada Juni dan Desember.
22	Apakah pernah ditemukan kasus penyalahgunaan keuangan desa di desa Grujugan?	Untuk grujugan sendiri untuk sekarang belum ditemukan kasus penyelewengan dana desa. Tapi kalau periode sebelumnya itu pernah, ketika desa menggunakan pjs dari kecamatan untuk sementara menggantikan kepala desa sebelumnya yang telah selesai masa jabatannya dan masih proses pemilihan kepala desa baru itu sebesar 600.000.000 dana desa dipakai untuk kepentingan pribadi. Setelah itu kami beserta warga melaporkan pada pihak kejaksaan untuk kemudian di tindak lanjuti. Itu ditemukan karena antara uang yang ditarik dengan laporan tidak sesuai dan tidak jelas untuk apa.
23	Apa harapan bapak terkait pengelolaan keuangan terutama di Desa Grujugan?	Harapan dari kami itu agar anggaran desa itu tetap sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat yg ke 2 harapkan kami agar desa-desa itu bisa mandiri dalam menjalankan perencanaannya. Kalau untuk grujugan ini sekarang sudah masuk pada status desa mandiri. Memang sudah banyak perubahan yang cukup signifikan dari sebelumnya. Dan status ini harus di iringi dengan kapasitas dan kualitas perangkat desa itu sendiri. Artinya harus seimbang. Tapi kalau dari kapasitas perangkat desa itu masih kurang. Karena ada yang mengundurkan diri dan itu harus segera digantikan.

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

<p>Informan 6</p> <p>Nama : Moh.Amin</p> <p>Tempat : Kantor Desa Grujugan</p> <p>Waktu : 09 Juni 2024</p>		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan aplikasi siskeudes diterapkan di desa Grujugan?	2017
2	Siapa saja yang memiliki akses untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes?	Kalau kami tidak punya akses masuk aplikasi tersebut. Jadi saya tidak tau apa saja aktivitas dalam aplikasi tersebut.
3	Apakah ada struktur dalam mengelola keuangan pada aplikasisiskeudes?	-
4	Apa tujuan dari penggunaan aplikasi siskeudes menurut bapak?	Yang pasti agar proses pengelolaan keuangan mengikuti prosedur sesuai ketentuan pemerintah.
5	Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes, apa yang digunakan Desa Grujugan dalam pengelolaan keuangan Desa?	manual
6	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes?	Lebih baik daripada pakek manual.
7	Apakah aplikasi siskeudes ini telah memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa?	iya
8	Apa saja kelebihan atau manfaat yang dirasakan dengan adanya siskeudes?	-
9	Menurut bapak apakah aplikasi ini sudah tepat sasaran untuk mewadahi proses pengelolaan keuangan Desa Grujugan?	Kalau menurut saya pengelokasian dana desa sudah tepat sasaran, karena dalam penetapan kegiatan desa melakukan musyawarah dan melibatkan seluruh pihak dan unsur

		masyarakat. Dan di musyawarah tersebut juga menerima usulan
10	Apakah aplikasi siskeudes sudah tepat dan berhasil diterapkan dengan efektif di Desa Grujugan?	sudah
11	Apakah aplikasi siskeudes lebih akuntabel dalam meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa?	Iya lebih baik lah.
12	Apa saja kendala dari aplikasi siskeudes di Desa Grujugan?	-
13	Bagaimana bentuk input dan output aplikasi siskeudes?	-
14	Apa Siskeudes ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan Desa?	Pastinya kalau untuk desa sendiri sangat membantu
15	Apakah ada pelatihan dan pendampingan dari pemda terkait pengoperasian aplikasi siskeudes?	Setahu saya ada dari DPMD
16	Bagaimana tahap perencanaan hingga tahap peleporan pengelolaan keuangan di desa Grujugan?	Dari perencanaan kita itu menyiapkan kebijakan pemerintah desa dengan kepala desa menyepakati rancangan peraturan desa. Sebelum itu melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kemudian kita membahas apbdes dalam musdes untuk menetapkan perdes apbdes. Setelah berlaku pagu anggaran maka kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBDes yang sumber uangnya dari pendapatan desa. Nanti harus ada laporan kegiatan setelah kegiatan terselenggara.
17	Untuk penggunaan aplikasinya sendiri apakah setiap hari, setiap bulan, atau setiap ada pengeluaran?	-
18	Keuangan desa di desa Grujugan bersumber dari mana saja?	DD, ADD, BUMDES, Bantuan keuangan, pengelolaan tanah desa.
19	Sejauh ini bentuk publikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan dengan metode apa kepada masyarakat?	Kalau untuk realisasi penggunaan dana atau APBDes itu bisa dilihat melalui website desa, banner dan desa grujugan ini juga melakukan penyampaian secara terbuka atau

		forum di balai desa dengan menghadirkan unsur masyarakat.
20	Bagaimana respon masyarakat terkait bentuk pertanggungjawaban dengan media tersebut?	Ada yang paham dan tidak.
21	Apakah ada controlling tentang pengelolaan keuangan desa?	Kalau dari kecamatan ada. Kalau dari kita juga melakukan pengawasan.
22	Apakah pernah ditemukan kasus penyalahgunaan keuangan desa di desa Grujugan?	Yang sekarang belum ada.
23	Apa harapan bapak terkait pengelolaan keuangan terutama di Desa Grujugan?	Lebih baik lagi pasti. Terutama pelayanan terhadap kebutuhan bantuan masyarakat. Agara lebih merata pada yang sangat membutuhkan.



### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan 7
Nama : Wahed
Tempat : Rumah Warga

Waktu : 09 Juni 2024		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak tahu tentang aplikasi siskeudes?	Pernah denger kalo sekarang desa udah pakek aplikasi itu, Cuma selebihnya kurang tahu.
2	Apakah bapak tahu tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan?	Kalau pengelolaan keuangannya seperti apa ya kita tahunya di banner itu.
3	Menurut bapak, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari keuangan desa yang disampaikan oleh aparat desa kepada masyarakat?	Yang saya lihat sekarang desa itu sudah alhamdulillah bagus dari segi administrasi dan keterbukaan pak kades tentang keuangan. Sudah ada penyampaian pertanggungjawaban, di banner juga terpampang, kalo mau lihat di website juga ada.
4	Apakah bapak ikut berpartisipasi ketika ada penyampaian terbuka tentang laporan keuangan desa?	Pernah sekali tahun kemaren
5	Setahu bapak, Apa bentuk riil dari pengelolaan keuangan desa yang dilakukan untuk desa?	Ada bantuan uang untuk yang benar-benar tidak mampu, beras, juga untuk lansia yang janda, pemberian bantuan makanan sehat untuk bumil, aspal jalan sebelah utara sd itu juga dari desa.

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan 8
Nama : Munawar
Tempat : Rumah Warga

Waktu : 9 Juni 2024		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak tahu tentang aplikasi siskeudes?	-
2	Apakah bapak tahu tentang pengelolaan keuangan desa di desa Grujugan?	Gk tau. Tapi saya taunya kalau sudah pas ada bantuan dari desa itu.
3	Menurut bapak, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari keuangan desa yang disampaikan oleh aparat desa kepada masyarakat?	saya gak tau dek, karena gk paham tentang begituan.
4	Apakah bapak ikut berpartisipasi ketika ada penyampaian terbuka tentang laporan keuangan desa?	nggak
5	setahu bapak, Apa bentuk riil dari pengelolaan keuangan desa yang dilakukan untuk desa ?	Bantuan

## Lampiran 2

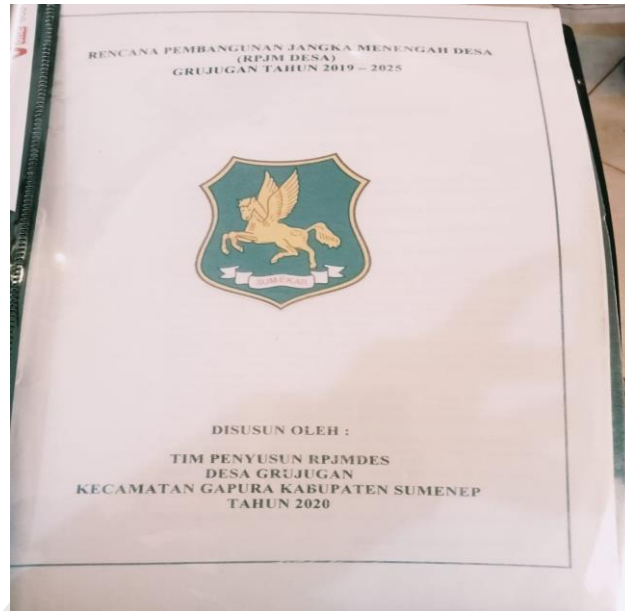
### LEMBAR OBSERVASI

Waktu Observasi: 7 juni 2024  
Tempat : Kantor Desa Grujugan

NO	Aspek yang Diamati	Komentar
1	<p>Aplikasi siskeudes yang digunakan di Desa Grujugan adalah aplikasi sistem keuangan desa versi V2.0.R2.0.5 yang di dalamnya terdapat 4 menu berupa parameter, data entri, laporan, tools, dan menu <i>help</i>. Menu parameter merupakan menu administrasi pengguna berupa data umum desa, <i>password</i>, dan level pengguna, rekening desa, dan data umum lainnya. Menu data entri merupakan menu tahapan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 4 modul berupa; modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan</p>	
2	<p>Ada 4 tahap dalam proses pengelolaan keuangan desa Grujugan sesuai modul dalam aplikasi Siskeudes, yaitu: Perencanaan, penganggaran/pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.</p>	
3	<p><i>Output</i> dari aplikasi siskeudes pada menu perencanaan adalah data umum Desa, RPJMDes dan RKPDes.</p>	
4	<p>output utama parameter penganggaran adalah anggaran kas desa dan APBDes serta penjabaran APBDes</p>	
5	<p>output pada menu penatausahaan yaitu berupa SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, buku kas umum, buku kas tunai, buku bank, buku panjar, dan kuitansi</p>	
6	<p>Output dari menu pelaporan/ Pertanggungjawaban berupa laporan pembukuan, realisasi APBDes, dan Catatan atas laporan keuangan (CaLK).</p>	

### Lampiran 3

*Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Grujugan Tahun 2019-2025*




6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Desa)	Pembelanjaan Volume	Sumber Mekanik	Waktu Pelaksanaan					Pembelanjaan Dana Daster		Pembelanjaan		
							Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	2019	2020	Realisasi	Target	
1			Pelatihan kader kesehatan	Desa Grujugan	3 Hari	97 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	2.700.000	RPJMD	✓	✓	
2			Pelatihan RW/RT	Desa Grujugan	6 Hari	30 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000	RPJMD	✓	✓	
3			Pelatihan Komunitas Untuk Persejahteraan Desa	Desa Grujugan	6 Hari	60 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	RPJMD	✓	✓	
4			Pelatihan Komunitas Untuk SP3	Desa Grujugan	2 Hari	27 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	2.700.000	RPJMD	✓	✓	
5			Pelatihan Komunitas Untuk Persejahteraan	Desa Grujugan	2 Hari	80 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	RPJMD	✓	✓	
6			Pelatihan Pemeliharaan Mekanik/Persejahteraan	Desa Grujugan	1 Hari	40 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	RPJMD	✓	✓	
7			Pelatihan Pemeliharaan Mekanik	Desa Grujugan	750 KK	750 KK	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	RPJMD	✓	✓	
8			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	1 Paket	75 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	RPJMD	✓	✓	
9			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	1 Paket	30 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	7.500.000	RPJMD	✓	✓	
10			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	2 Paket	80 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	RPJMD	✓	✓	
11			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	30 Orang	30 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	5.500.000	RPJMD	✓	✓	
12			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	35 Orang	35 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000	RPJMD	✓	✓	
13			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	22 Paket	24 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	RPJMD	✓	✓	
14			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	30 Orang	30 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	RPJMD	✓	✓	
15			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	40 Orang	40 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	RPJMD	✓	✓	
16			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	50 Orang	50 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000	RPJMD	✓	✓	
17			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	30 Orang	30 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	RPJMD	✓	✓	
18			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	30 Orang	30 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	RPJMD	✓	✓	
19			Saluran Air Bersih	Desa Grujugan	30 Orang	30 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	RPJMD	✓	✓	
<b>Jumlah Per Bidang 6</b>												<b>198.000.000</b>				

**Lampiran 4**

*Salah Satu Pelaporan dengan Sistem Manual Menggunakan Microsoft Excel*

 <b>RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA GRUJUGAN KECAMATAN GAPURA TAHUN ANGGARAN 2023</b>					
1	BIDANG	: BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK			
2	SUB. BIDANG	: Sub Bidang Keadaan Mendesak			
3	KEGIATAN	: Keadaan Mendesak			
4	WAKTU PELAKSANAAN	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
	RINCIAN PENGGUNAAN	:			
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SUMBER
1	Sub Bidang Keadaan Mendesak			115.200.000,00	DD
	Keadaan Mendesak			115.200.000,00	
	BLT DESA	4 Bh 96	300.000	115.200.000,00	
				-	
<b>JUMLAH</b>				<b>115.200.000</b>	
Disetujui, KEPALA DESA GRUJUGAN			Telah Diverifikasi, SEKRETARIS DESA	Grujugan, Desember 2022 Pelaksana Kegiatan, KASI KESEJAHTERAAN	

**MANUAL**

*Tampilan Awal Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Grujugan*



**Lampiran 5**

*Input Data ke dalam Aplikasi Siskeudes*

...: Data Penganggaran APBDesa

**PEMERINTAH DESA GRUJUGAN**

**DATA BELANJA DESA**

Kegiatan

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan 1

Pembiayaan 2

PAK

**Bidang ::** Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak  
Rekening : 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga Rp 0,00

No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
01	BLT Desa	115.200.000,00	0,00

Nomor Urut: 01 0,00    0,00

Uraian: BLT Desa Max.50Chr

Anggaran: 115.200.000,00

Perubahan: 0,00

Jumlah: 115.200.000,00

[ Rincian ]

Jumlah Satuan: 384 OB

Harga Satuan: 300.000,00 SBU

Sumberdana: Dana Desa (Dropping APBN)

**INPUT SISKEUDES**

*Salah Satu Output keluaran dari Aplikasi Siskeudes*

PEMERINTAH DESA GRUJUGAN PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023								
Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Sub Bidang : 5. Kegiatan : 5.00. Penanganan Keadaan Mendesak Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Output/Keluaran : BLT Desa								
KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / ( BERKURANG )
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			115.200.000,00			115.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			115.200.000,00			115.200.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			115.200.000,00			115.200.000,00	0,00
	01. BLT Desa	DDS	384 OB	300.000,00	384 OB	300.000,00	115.200.000,00	0,00
	JUMLAH (Rp)			115.200.000,00			115.200.000,00	0,00
	Mengesahkan, Kepala Desa	Telah Diverifikasi Sekretaris Desa			08 June 2024 Pelaksana Kegiatan Anggaran.			
	DIDIK SUSANTO	KIPNO			M. KHALIL			

**Lampiran 6**

*Transparansi Realisasi Anggaran dan APBDes dengan Banner dan Sistem Informasi Desa Grujugan*

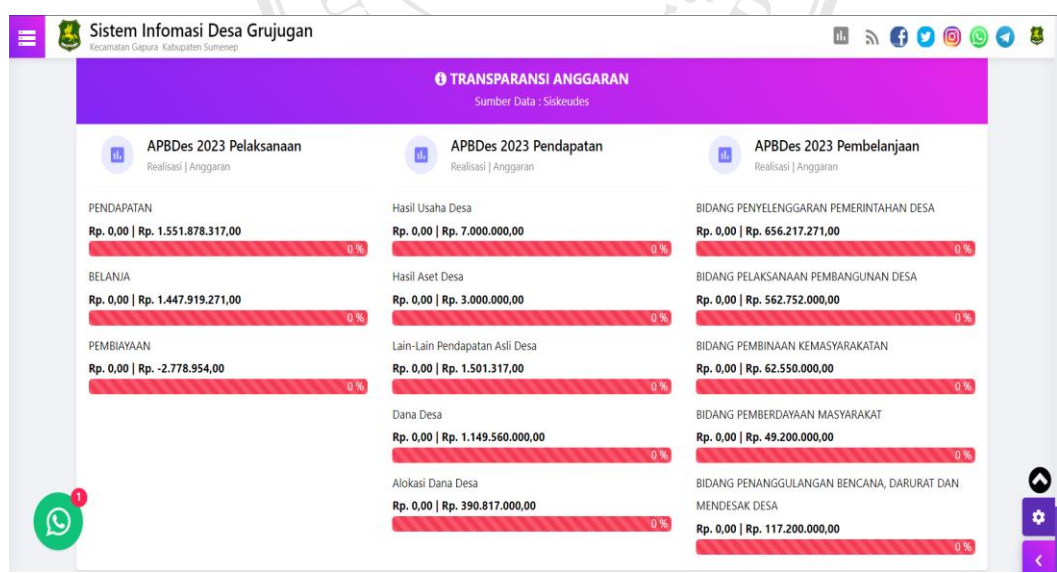
### REALISASI PELAKSANAAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2023 DESA GRUJUGAN

Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
<b>PENDAPATAN</b>			
PENDAPATAN ASLI DESA	30.000.000	10.000.000	-
DANA DESA	1.289.202.000	1.289.202.000	-
ALOKASI DANA DESA	390.817.000	390.817.000	-
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	27.266.000	27.266.000	-
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	700.000.000	700.000.000	-
PENDAPATAN LAIN-LAIN	5.319.517	6.220.440	(900.923)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.422.604.517</b>	<b>2.423.505.440</b>	<b>(900.923)</b>
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	635.767.471	613.533.154	22.234.317
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.253.928.000	1.178.346.346	75.581.654
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	262.550.000	262.550.000	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	49.200.000	49.200.000	-
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	117.200.000	117.200.000	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.318.645.471</b>	<b>2.220.829.500</b>	<b>97.815.971</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.778.954	2.778.954	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	106.738.000	106.738.000	-

Jalan Raya Dungkak Km.20  
Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep  
Telp. +6292333147721 | Mail. grujugan@sumenep.go.id  
Kode Pos 69272

**BERKUALITAS BISA!**



Lampiran 7

Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Desa Grujugan



*Dokumentasi Wawancara Bersana Sekretaris Desa Grujugan*



## **Lampiran 8**

*Dokumentasi Wawancara Bersana Kaur Keuangan Desa Grujugan*



*Dokumentasi Wawancara Bersana Badan Permusyawaratan Desa Grujugan*



**Lampiran 9**

*Dokumentasi Wawancara Bersana Operator Siskeudes*

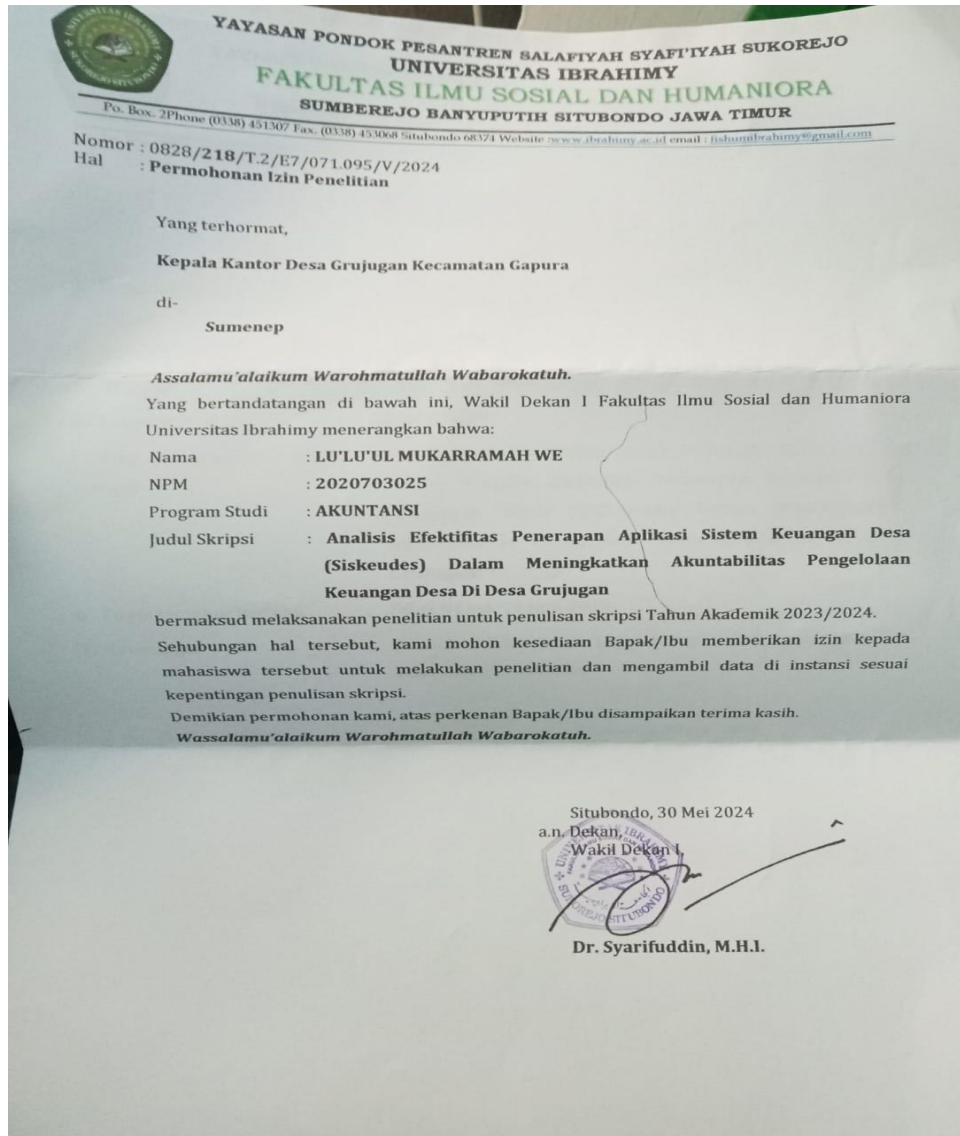


*Dokumentasi Wawancara Bersana Pendamping Desa*



**Lampiran 10**

*Surat Permohonan Izin Penelitian*



## Lampiran 11

### *Surat Tugas Penelitian*

 **YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO**  
**UNIVERSITAS IBRAHIMY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**  
Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.ibrahimy.ac.id](http://www.ibrahimy.ac.id) email : [fishumibrahimy@gmail.com](mailto:fishumibrahimy@gmail.com)


**SURAT TUGAS**  
Nomor : 0828/219/M.3/E7/071.095/V/2024

1. Lembaga yang memberikan Tugas : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo
2. Yang diberi Tugas : **LU'LU'UL MUKARRAMAH WE**
3. NPM : 2020703025
4. Program Studi : **AKUNTANSI**
5. Yang bersangkutan diberi tugas : Melaksanakan Penelitian untuk Penulisan skripsi dengan judul : **"Analisis Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Grujungan"**
6. Tugas tersebut berlaku : Sejak 01 s.d. 14 Juni 2024
7. Keterangan : Selesai melaksanakan tugas harap membuat laporan dan diserahkan ke Fakultas

Situbondo, 30 Mei 2024  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
**Dr. Syarifuddin, M.H.I.**

## Lampiran 12

### *Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian*



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN GAPURA  
KEPALA DESA GRUJUGAN**  
Jl. Raya Dungek Km.20 Hp: 082333147721 Mail: [grujugan.gpr@gmail.com](mailto:grujugan.gpr@gmail.com)  
**GRUJUGAN** Kode Pos : 69472


**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 470/ *47* /435.320.104/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : LU'LU'UL MUKARRAMAH  
Tempat / Tanggal Lahir : Sumenep, 22 Septamber 2002  
NPM : 2020703025  
Fakultas : ilmu sosial dan humaniora (FISHUM)  
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di kantor kepala Desa Grujugan, terhitung tanggal. 01 - 10 2024 guna penulisan sekripsi dengan judul : **'SEKRIPSI : ANALISIS EFEKTIFITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA GRUJUGAN.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Grujugan, Juni 2024  
KÉPALA DESA GRUJUGAN  
  
**DIDIK SUSANTO**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lu-lu-ul Mukarramah WE Prodi : AKUNTANSI  
 NPM : 2020703025 Pemb. I : ABD. MUJIB, S.Pd.I, M.AKUN

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF DOSEN
1.	15 / 24 6	Rumusan Masalah, Gap penelitian	
2.	25 / 24 6	Typo, Tambahkan Kajian Keislaman	
3.	09 / 24 7	Tambahkan Jurnal Intemasional	
4.	23 / 24 7	Berdasarkan narasumber, Cocokkan metode apa yang digunakan.	
5.	01 / 24 08	ACC.	
6.			
7.			
8.			

JUDUL SKRIPSI: Analisis Efektivitas penerapan Aplikasi berbasis Dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa di Desa Grogogan kec. Gapura Kab. Sumeng.

Situbondo, 01 Agustus 2024  
Dosen Pembimbing I,

ABD. MUJIB, S.Pd.I, M.AKUN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lu'luul Mukarrahmah WE Prodi : Akuntansi  
 NPM : 2020703025 Pemb. II : Hendrianto Widodo, M.Af.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF DOSEN
1.	22/1 6 24	Tambahkan literasi (artikel dan sebagainya) dalam bentuk jurnal	
2.	03/7 24	Carbunan fakta lapangan.	
3.	14/7 24	Metode penelitian, Validasi Data.	
4.	30/7 24	Fotofoto, lembar observasi	
5.	06/08 24	ACC Munasabah	
6.			
7.			
8.			

JUDUL SKRIPSI: Analisis Efektivitas penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa Si Desa Gugungan Kec. Gupura Kab. Sumenep.

Situbondo, 06 Agustus 2024  
 Dosen Pembimbing II,  
  
 Hendrianto Widodo M.Af.

## BIODATA PENULIS



**LU'LU'UL MUKARRAMAH WE**, Lahir di Kabupaten Sumenep yang dijuluki sebagai “Kota Keris” karena konon merupakan pusat produksi keris, pada tanggal 22 September 2002. Merupakan putri pertama dari seorang Ayah terhebat yang bernama Ayah Wahed dan lahir dari Rahim Ibu terkuat yang bernama Umi Erna Haninastutik semoga selalu tercurahkan anugerah Allah SWT pada beliau dan selalu dalam Ridho-Nya. Ke-empat adik-adik tercintanya tak lupa menjadi pelengkap dari keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang, Sika, Mila, Arul, dan Aril. Prinsip yang selalu dia pegang adalah “Apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan siapa kamu di masa mendatang. So do the best, be the first, and, be different.”

Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SDN Sindang Sari 2 Tangerang, SDN Cengklong 3, MI Al-Karimiyah, MI Al-Madinah) karena hidupnya yang nomaden menyebabkan tempat pendidikannya beragam. Lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan ke Menengah Pertama (MTS Al-Madinah Sumenep) Lulus tahun 2017. Kemudian melanjutkan study ke pondok pesantren tercinta ini yakni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK IBRAHIMY 01 Sukorejo) Jurusan Akuntansi, lulus tahun 2020 silam. Dan saat ini berstatus sebagai Mahasiswi tingkat akhir di (UNIVERSITAS IBRAHIMY) Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Prodi Akuntansi.

Email: [lulukkanza39966@gmail.com](mailto:lulukkanza39966@gmail.com).